

**Pengaruh Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap  
Transparansi Laporan Keuangan Serta Implikasinya Terhadap  
Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah  
Daerah Kota Binjai**

**TESIS**

**Oleh:**

**MUHAMMAD SANUSI HASIBUAN**  
**1820050040**



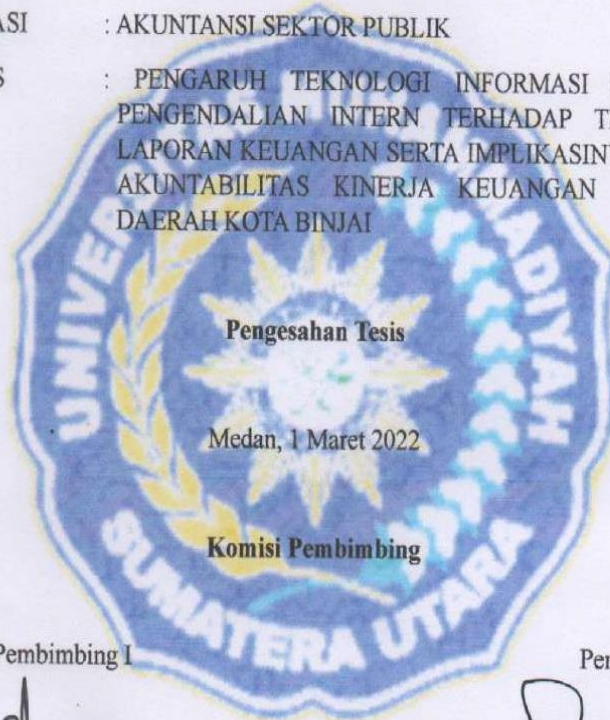
**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

**PENGESAHAN TESIS**

NAMA : **MUHAMMAD SANUSI HASIBUAN**  
NPM : 1820050040  
PROGRAM STUDI : **MAGISTER AKUNTANSI**  
KONSENTRASI : **AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**  
JUDUL TESIS : **PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP TRANSPARANSI  
LAPORAN KEUANGAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA BINJAI**



Pembimbing I

**Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak, CA**

Pembimbing II

**Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA., CPA**

**UMSU**

Diketahui

Direktur

**Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M. Hum.**

Ketua

Program Studi Magister Akuntansi

**Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak, CA**

**PENGESAHAN**

**PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN SERTA IMPLIKASINYA  
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI**

**MUHAMMAD SANUSI HASIBUAN**

1820050040

Program Studi Magister Akuntansi

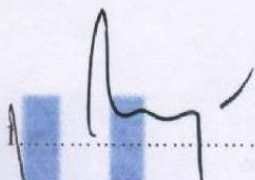
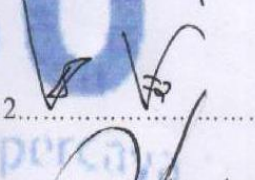
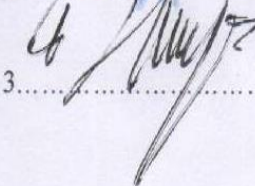
“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Akuntansi (M. Ak.)”  
Pada Hari Selasa, 1 Maret 2022

**Komisi Penguji**

1. Assoc. Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA.  
Ketua

2. Dr. IRFAN, S.E., M.M.  
Sekretaris

3. Dr. DAHRANI, S.E., M.Si.  
Anggota

1.   
2.   
3. 

### Lembar Tidak Melakukan Plagiat dan Memalsukan Data

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Muhammad Sanusi Hasibuan**  
NPM : 1820050040  
Program Studi : **Magister Akuntansi**  
Judul Tesis : **Pengaruh Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Serta Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Benar tesis saya adalah karya sendiri, bukan dikerjakan orang lain
2. Saya tidak melakukan plagiat dalam penulisan tesis saya
3. Saya tidak merubah dan memalsukan data penelitian saya

Jika ternyata dikemudian hari saya terbukti telah melakukan salah satu hal tersebut di atas, maka saya bersedia dikenai sanksi yang berlaku berupa pencopotan gelar saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Maret 2022

Saya yang membuat Pernyataan,



**MUHAMMAD SANUSI HASIBUAN**  
1820050040

**Pengaruh Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap  
Transparansi Laporan Keuangan Serta Implikasinya Terhadap  
Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah  
Daerah Kota Binjai**

**Oleh:**

**MUHAMMAD SANUSI HASIBUAN  
1820050040**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa Pengaruh Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Serta Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai. Jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian adalah staff pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Binjai dengan jumlah 36 Kedinasan. Adapun penentuan jumlah sampel yang digunakan oleh penulis ini adalah dengan metode sensus berdasarkan sampling jenuh dengan penentuan sampel semua anggota populasi digunakan sebagai sampel istilah lain dan sampel jenuh. Sampel yang digunakan adalah staff pegawai yang termasuk dalam kategori jabatan Kasubbag keuangan, Kasubbag program, dan Bendahara Pengeluaran dengan jumlah 108 orang. Penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern sedangkan variabel dependen adalah Akuntabilitas Kinerja Keuangan serta Transparansi Laporan Keuangan sebagai Variabel Intervening. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif, Analisa Struktural Equation Modeling (SEM) berbasis variance (Partial Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Tansparansi Laporan Keuangan; (2) Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Tansparansi Laporan Keuangan; (3) Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan; (4) Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan; (5) Transparansi Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan; (6) Transparansi Laporan Keuangan memediasi pengaruh Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan; (7) Transparansi Laporan Keuangan memediasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan.

**Kata Kunci: Teknologi Informasi; Sistem Pengendalian Intern;  
Transparansi Laporan Keuangan Serta Akuntabilitas  
Kinerja**

***The Influence of Information Technology and Internal Control Systems on the Transparency of Financial Statements and Its Implications on Accountability for Government Financial Performance Binjai City Area***

**MUHAMMAD SANUSI HASIBUAN**

**1820050040**

**ABSTRACT**

*This study aims to examine and analyze the Effect of Information Technology and Internal Control Systems on the Transparency of Financial Reports and Its Implications for the Accountability of the Financial Performance of the Binjai City Government. The type of research conducted is using an associative approach. The population in this study were staff employees at the Regional Apparatus Organization of Binjai City district with a total of 36 services. The determination of the number of samples used by this author is the census method based on saturated sampling with the determination of samples of all members of the population used as samples of other terms and saturated samples. The sample used is staff of employees who are included in the category of Head of Sub Division of Finance, Head of Sub Division of Program, and Expenditure Treasurer with a total of 108 people. This research consists of independent variables, namely Information Technology and Internal Control Systems, while the dependent variable is Financial Performance Accountability and Financial Report Transparency as Intervening variables. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis, Structural Equation Modeling (SEM) analysis based on variance (Partial Least Square). The results showed that; (1) Information Technology affects the Transparency of Financial Statements; (2) the Internal Control System affects the Transparency of Financial Statements; (3) Information Technology has an effect on Financial Performance Accountability; (4) Internal Control System has an effect on Financial Performance Accountability; (5) Financial Report Transparency has an effect on Financial Performance Accountability; (6) Financial Report Transparency mediates the influence of Information Technology on Financial Performance Accountability; (7) Financial Report Transparency mediates the influence of the Internal Control System on Financial Performance Accountability.*

**Keywords:** ***Information Technology; Internal Control System; Financial Report Transparency and Accountability Performance***

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah S.W.T, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya semata sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul Pengaruh Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Serta Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai.

Penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Pasca Sarjana Jurusan Magister Akuntansi.

Penyusunan tesis ini dapat terlaksana tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak khususnya kepada kedua orang tua saya Marahuddin Hasibuan, S.Pd.I dan Nur Hasanah Nasution yang telah banyak memberikan dukungan dan do'a sehingga langkah saya diberkahi dan dirahmati Allah S.W.T. Terlepas dari pada itu, terdapat juga pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam penulisan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M. Hum., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA. CPA Selaku Ketua Prodi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen pembimbing I yang membantu saya dalam penulisan tesis ini.

4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Maya Sari SE., M.Si., Ak., CA sebagai Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA. CPA selaku Dosen pembimbing II yang juga memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan tesis saya ini.
6. Ibu Cut Alfaini Rahmah Fauzana Selian, S.Farm., Apt. Yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran dan masukan untuk penyusunan tesis ini.

Kepada mereka semua, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya. Semoga amal baik mereka diterima dan dilipat gandakan oleh Allah S.W.T. Jauh dari pada itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini kurang mendekati kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan sumbangsi dari para pembaca berupa kritik dan saran yang membangun guna tercapainya penyusunan tesis yang lebih baik.

**Penulis**

**MUHAMMAD SANUSI HASIBUAN**



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	8
1.3. Rumusan Masalah .....	9
1.4. Tujuan Penelitian.....	10
1.5. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II.....	12
LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Akuntabilitas Kineja Keuangan .....	12
2.1.1. Pengertian Akuntabilitas Kinerja .....	12
2.1.2. Jenis-Jenis Akuntabilitas Kinerja Keuangan.....	14
2.1.3. Indikator Akuntabilitas Kinerja.....	19
2.1.4. Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja .....	21
2.2. Transparansi.....	27
2.2.1. Pengertian Transparansi.....	27
2.2.2. Manfaat dan Tujuan Transparansi Laporan Keuangan.....	28
2.2.3. Dimensi Transparansi Laporan Keuangan .....	32
2.1.4 Indikator transparansi .....	35
2.1.5 Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi .....	38
2.3. Teknologi Informasi .....	40
2.3.1. Pengertian Teknologi Informasi .....	40
2.3.2. Tujuan dan Fungsi Teknologi Informsi .....	41
2.3.3. Indikator Teknologi informasi.....	42
2.4. Sistem Pengendalian Intern.....	44
2.4.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern .....	44
2.4.2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern .....	46
2.4.3. Indikator Sitem Pengendalian Intern .....	48
2.5. Penelitian Terdahulu.....	52
2.6. Kerangka Konsep .....	55
2.6.1. Keterkaitan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinejerja Keuangan .....	55
2.6.2. Keterkaitan Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja.....	56
2.6.3. Keterkaitan Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Transparansi Laporan Keuangan.....	58
2.6.5. Keterkaitan Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas .....	60
2.7. Hipotesis .....	61

BAB III.....	63
METODE PENELITIAN .....	63
3.1. Pendekatan Penelitian.....	63
3.2. Definisi Operasional.....	63
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian .....	65
3.4. Populasi dan Sampel.....	66
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	67
3.5.1. Uji Instrumen.....	68
3.6. Teknik Pengolahan Data.....	73
3.6.1. Analisis model pengukuran ( <i>Outer Model</i> ).....	74
3.6.2. Analisis Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ) .....	75
3.6.3. $f^2$ ( $f^2$ -Square).....	75
3.6.4. Pengaruh Langsung ( <i>Direct Effect</i> ).....	76
3.6.5. Pengaruh Tidak langsung ( <i>Indirect Effect</i> ) .....	76
3.6.6. Total effect .....	77
BAB IV .....	78
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	78
5.1. Hasil Penelitian .....	78
4.1.1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Binjai .....	78
4.1.2. Deskripsi Data Hasil penelitian .....	79
4.1.3. Teknik Analisis Data .....	93
5.2. Pembahasan.....	107
BAB V.....	124
KESIMPULAN DAN SARAN .....	124
5.1. Kesimpulan .....	124
5.2. Saran .....	125
DAFTAR PUSTAKA .....	126
LAMPIRAN .....	129

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan refleksi atau bagian dari kinerja organisasi publik. Pemerintah daerah Kota Binjai merupakan salah satu Kota yang melaksanakan penilaian kinerja organisasi publik secara baik, juga terus berupaya untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintahannya. Dalam mewujudkan kinerja tersebut, diperlukan pegawai yang memiliki pengendalian akuntansi yang tinggi, dan memiliki kompetensi yang baik, serta menerapkan hal-hal yang menuju pemerintahan yang baik.

Isu tentang kinerja pemerintah daerah dewasa ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Keadaan negara saat ini sangat memprihatinkan hal ini disebabkan oleh kurang adanya penerapan sistem pemerintahan yang baik, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bukan saja sistemnya yang belum tertata tetapi krisis multidimensi yang dihadapi oleh negara saat ini (Auditya. 2013).

Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi

kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik (Riantiarno, 2011).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Definisi akuntabilitas publik menurut (Penny Kusumastuti 2014) adalah sebagai berikut : “Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya”.

Kemudian menurut (Abdul Halim 2012) definisi akuntabilitas publik adalah “Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.

Kinerja pemerintah harus diukur agar dapat diketahui bagaimana pemerintah itu melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan atau kinerja non keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dilakukan dengan melihat laporan keuangan yang buat setiap akhir periode. sedangkan untuk mengukur kinerja non keuangan dapat dilakukan dengan menilai sejauh mana pemerintah dapat mencapai apa yang telah ditargetkan dan sejauh mana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Menurut (Dadang 2007) berjalannya kegiatan pemerintahan yang akuntabel dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, dan adanya output dan outcome yang terukur.

Selain itu (Manggaukang Raba, 2006) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu legitimasi bagi para pembuat kebijakan. keberadaan kualitas moral yang memadai, kepekaan, Keterbukaan. pemanfaatan sumber daya secara optimal dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Menurut (Mardiasmo, 2002) terdapat 3 fungsi utama sektor publik: (1) Melakukan pelayanan publik yang sangat vital bagi kepentingan umum. (2) Mendefinisikan prinsip operasional masyarakat. (3) Menyediakan pelayanan publik yang diperlukan karena tidak ada sektor swasta atau nirlaba yang ingin menanganinya.

Berdasarkan hasil penelusuran kinerja keuangan di kantor pemerintahan daerah Kota Binjai, didapatkan beberapa temuan yang dijabarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**

**Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Binjai**

Indikator Kinerja Utama	Target dan Capaian Kinerja									
	2016		2017		2018		2019		2020	
Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indeks Reformasi Birokrasi	B	C	B	CC	B	CC	B	B	B	B
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99	85	99	85	99	90	99	95	99	96

Sumber : Data Pemerintah Daerah Kota Binjai

Perolehan Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kota Binjai pada tabel 1.1 menunjukkan pencapaian kinerja keuangan yang signifikan dimana pada lima tahun terakhir pemerintah Kota Binjai telah menciptakan pelaporan keuangan yang baik. Kemudian indeks reformasi birokrasi dari tahun 2016 hingga 2020 telah mengalami kenaikan yang signifikan dimana pada tahun 2019 dan 2020 target indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kota Binjai telah tercapai. Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat juga mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2016 hingga 2020 namun target yang ditetapkan belum tercapai.

Dari hasil pelaporan kinerja tersebut dapat disimpulkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Binjai telah terlaksana dengan baik. Namun pada faktanya dalam pencapaian indikator kinerja utama terkait indeks kepuasan masyarakat tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Dari hasil penelusuran peneliti menemukan beberapa ketidaksesuaian diantaranya, dalam pelayanan informasi publik Pemerintah Kota Binjai tidak terbuka dimana masih terdapat beberapa kendala yang dialami pemangku kepentingan dalam memperoleh berbagai informasi terkait kegiatan pemerintah utamanya laporan terkait penggunaan anggaran pemerintah. Kemudian ketidaksesuaian juga terlihat dari pemanfaatan sumber daya. Salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya yang tidak dijalankan yaitu pelaporan yang tidak dipublikasi di media-media informasi berupa situs pemerintahan.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang baik, menurut Dadang Solihin (2007) terdapat aspek-aspek pelaksanaan yang harus dipenuhi. Aspek tersebut berupa, adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur

pelaksanaan, tersedianya laporan tahunan, adanya sistem pengawasan, dan tersedianya akses publik.

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan wilayah Pemerintahan. Menurut (Mardiasmo, 2006) transparansi adalah keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pelaksanaan pemerintahan yang transparan dapat dilihat melalui beberapa aspek berupa, Pengelolaan Keuangan diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, Pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah diselenggarakan berdasarkan proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM) dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu, penyebarluasan laporan keuangan telah disampaikan melalui media, informasi tentang laporan keuangan disampaikan melalui media televisi, radio dan koran, terdapat akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan, terdapat tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya dan kelengkapan informasi berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan, ada ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai, Ketersediaan sistem informasi akan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta

sebagai masukan dalam melakukan evaluasi penyampaian Laporan Keuangan telah melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan.

Pada pelaksanaannya, kegiatan pelaporan kinerja pemerintah yang transparan diwilayah pemerintah daerah Kota Binjai belum terlaksana. Hal ini terlihat dari hasil publikasi Laporan Keuangan Pemerintah yang tertutup dan tidak diberikan informasi yang jelas atas laporan keuangan kepada masyarakat. Pada dasarnya penerapan transparansi ini sejalan dengan pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam pelaksanaan pelaporan kegiatan pemerintah cenderung menyembunyikan informasi-informasi keuangan dimana seharusnya informasi keuangan tersebut dapat diperoleh oleh masyarakat maupun para pemangku kepentingan. Selain itu, dalam pemerolehan pelaporan keuangan juga terdapat prosedur yang menyulitkan para pengguna laporan keuangan berupa tahapan permohonan ke pada berbagai pihak.

Kemudian dari penggunaan teknologi informasi, Pemerintah daerah Kota Binjai tidak mempergunakan ketersediaan Teknologi Informasi dengan efektif dan efisien untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan pemerintah yang telah dilaksanakan secara meluas kepada Publik ataupun masyarakat. Hal ini terlihat dari kekosongan laporan pada situs-situs pemerintahan dimana seharusnya dalam situs tersebut terdapat informasi berupa laporan kegiatan maupun kinerja serta laporan pengelolaan keuangan daerah. Kemudian tidak dipergunakannya teknologi informasi guna memudahkan masyarakat atau para pemangku kepentingan untuk memperoleh laporan-laporan kegiatan pemerintahan.



Dalam pelaksanaan transparansi laporan keuangan guna pencapaian akuntabilitas kinerja yang baik diperlukan suatu system yang berguna melakukan pengendalian atas berbagai tahapan dan prosedur pelaksanaannya. Salah satu upaya pengendalian tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan sistem pengendalian intern. Menurut Menurut (Rai, 2008) Sistem pengendalian Intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarnya. Dalam hal ini system pengendalian intren merupakan alat yang dapat dipergunakan dalam mengatur dan mengontrol kegiatan dalam suatu organisasi sehingga kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan prosedur dan tujuan (Yosa, 2010).

Namun yang terjadi saat ini Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan belum sepenuhnya mampu menciptakan citra kualitas pelaporan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya atau andal. Dari hasil Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) di peroleh hasil pelaporan yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan pemerintah telah berjalan dengan baik. Namun dari hasil penelusuran yang dilakukan peneliti, sistem pengendalian intern yang digunakan belum mampu menciptakan kinerja pemerintahan yang transparan serta menjaga keandalan laporan yang sesuai dengan fakta sebenarnya. Hal ini merupakan permasalahan yang terdapat dapa system pengendalian intern dimana system pengendalian intern yang digunakan tidak mampu melakukan kontrol atas pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil kegiatan.

Ketidak optimalnya penerapan system pengendalian intern di lingkungan pemeritahan juga terjadi akibat penilaian resiko yang diterapkan daam pelaksanaan pengendalian intern. Sistem pengendalian intern belum memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan menyebabkan kelalaian dalam pembuatan pelaporan keuangan, sehingga kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko, dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu.

Berdasarkan permasalahan kegiatan pemerintah yang telah diungkapkan, maka pada penelitian ini, Peneliti tertarik untuk menarik judul penelitian sebagai topik pembahasan **“Pengaruh Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Serta Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka hasil identifikasi terhadap permasalahan kinerja organisasi perangkat daerah yang akan diteliti yaitu:

1. Adanya ketidak selarasan akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah dengan pelaksanaan kegiatan keuangan pemerintah.
2. Terjadinya ketidak transparansian Pemerintah dalam pelaporan keuangan daerah

3. Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan pelaporan kegiatan pemerintah
4. Tidak optimalnya pelaksanaan system pengendalian intren di wilayah pemerintahan daerah.

### **1.3.Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh teknologi informasi terhadap Akuntabilitas kinerja keuangan Pemerintah?
2. Apakah terdapat pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap akuntabilitas Kinerja keuangan Pemerintah?
3. Apakah terdapat pengaruh teknologi informasi terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah?
4. Apakah terdapat pengaruh system pengendalian intren terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah?
5. Apakah terdapat pengaruh transparansi pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah?
6. Apakah transparansi pelaporan keuangan pemerintah memediasi pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah?
7. Apakah transparansi pelaporan keuangan pemerintah memediasi pengaruh system pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah?

#### **1.4.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah.
2. Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah.
3. Pengaruh teknologi informasi terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah.
4. Pengaruh sistem pengendalian intren terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah.
5. Pengaruh transparansi pelaporan keuangan pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah.
6. Pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah yang dimediasi transparansi pelaporan keuangan.
7. Pengaruh system pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah yang dimediasi transparansi pelaporan keuangan.

#### **1.5.Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi pihak penulis, sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mengenai pengaruh teknologi informasi, system pengendalian intren terhadap transparansi pelaporan keuangan serta implikasinta terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah.

## 2. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Binjai untuk pengembangan dan peningkatan kualitas kinerja pemerintah dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Akuntabilitas Kinerja Keuangan**

##### **2.1.1. Pengertian Akuntabilitas Kinerja**

Akuntabilitas adalah istilah yang sangat erat hubungannya dengan ilmu akuntansi dan manajemen. Akuntabilitas adalah prinsip yang selalu diterapkan oleh seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Menurut Adisasmita (2011:30), pengertian akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Definisi akuntabilitas publik menurut (Penny Kusumastuti 2014) adalah sebagai berikut :  
“Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya”.

Kemudian menurut (Abdul Halim 2012) definisi akuntabilitas public adalah  
“Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.”

Selain itu menurut Mahmudi (2013:9) Akuntabilitas Publik adalah “Kewajiban Agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.”

Menurut Indra Bastian (2010:385) Akuntabilitas Publik adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangna untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”

Serta menurut Deddi Nordiawan (2008:129) Akuntabilitas publik adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.”

Berdasarkan dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas itu sendiri mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat independen yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan. Dengan kata lain, akuntabilitas dalam dunia birokrasi suatu instansi pemerintah diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan serta dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatannya terutama dibidang administrasi keuangan agar dapat diketahui pertanggungjawabannya kepada publik.

### **2.1.2. Jenis-Jenis Akuntabilitas Kinerja Keuangan**

Jenis Akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa tipe diantaranya dibagi menjadi dua bagian menurut Ihyaul Ulum (2010:42) yaitu :

#### **1. Akuntabilitas Internal**

Akuntabilitas Internal Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah, dimana setiap pejabat/petugas publik baik individu/kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan mengenai perkembangan kinerja/hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan akuntabilitas internal pemerintah tersebut, telah diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **2. Akuntabilitas Eksternal**

Akuntabilitas Eksternal Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Akuntabilitas juga dibedakan menjadi beberapa macam atau tipe, (Jabra & Dwidevi) sebagaimana dijelaskan oleh (Sadu Wasistiono 2007:50) mengemukakan ada lima perspektif akuntabilitas, yaitu :

#### **1. Akuntabilitas Administratif/organisasi**

Pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas.



## 2. Akuntabilitas Legal

Akuntabilitas jenis ini merujuk pada dominan publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Akuntabilitas Politik

Dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.

## 4. Akuntabilitas Profesional

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.

## 5. Akuntabilitas Moral

Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

Selain itu, Akuntabilitas Publik terdiri dari atas dua macam menurut Mahmudi (2015:9) yaitu: Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability), Akuntabilitas Horisontal (Horizontal Accountability).

1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability),

Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya.

2. Akuntabilitas Horisontal (Horizontal Accountability).

Akuntabilitas Horisontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasanbawahan.

Kemudian menurut Ulum (2010:41) mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu, Akuntabilitas Keuangan, Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai Integritas Keuangan Pengungkapan serta Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Sasaran pertanggungjawaban ini yaitu laporan keuangan yang disajikan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Dengan dilaksanakannya tiga komponen tersebut dengan baik akan menghasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam hal pengambilan keputusan, tiga komponen tersebut menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan.

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan negara
- b. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia
- c. Undang-undang APBN
- d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah
- e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah
- f. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD
- g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah

Akuntabilitas Kinerja Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menggambarkan adanya kemauan pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur yang dapat diciptakan pemerintah agar lebih baik lagi. Tujuan akuntabilitas kinerja adalah untuk memperbaiki sense of accountability dan mempertanggungjawabkan keberhasilan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan atas pemberian amanah kepada pejabat pemerintahan.

Mardiasmo (2009:21) pun membagi dua macam Akuntabilitas Publik yang terdiri dari :

1. Pertanggungjawaban Vertikal (Vertical Accountability)
2. Pertanggungjawaban Horisontal (Horizontal Accountability)

Pertanggungjawaban Vertikal itu sendiri adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit pengelolaan dana kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

Sedangkan Pertanggungjawaban Horisontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Terwujudnya akuntabilitas publik merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal (horizontal accountability) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability). Tuntutan yang muncul adanya perlu dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Selain itu menurut Revrisond Baswir (2000:7) menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, maupun politik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Akuntabilitas pemerintahan tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberikan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan dan masyarakat beserta penggunaannya.

### **2.1.3. Indikator Akuntabilitas Kinerja**

Adapun indikator dalam akuntabilitas menurut Dadang (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya output dan outcome yang terukur.

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Adanya Standart Operating Procedure dalam
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan atau
3. Dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan
4. Mekanisme pertanggungjawaban
5. Laporan tahunan
6. Laporan pertanggungjawaban
7. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara
8. Sistem pengawasan
9. Mekanisme reward and punishment

Menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2003), akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain :

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat
2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah
3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka

Selain itu (Manggaukang Raba 2006:115) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti:

1. legitimasi bagi para pembuat kebijakan.
2. keberadaan kualitas moral yang memadai.
3. Kepekaan.
4. Keterbukaan.
5. pemanfaatan sumber daya secara optimal.
6. upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Apabila kita memperhatikan secara seksama dalam pernyataan diatas maka pemikiran kita akan melahirkan beberapa pertanyaan tentang sosok kepala pemerintahan dalam suatu tatanan pemerintahan yang pada dasarnya dan sudah seharusnya ideal untuk jadi kepala pemerintahan terutama pada takaran pedesaan. Karena rakyat sangat dekat dengan siapa yang akan menjadi kepala pemerintahan desa/kepala desa. Yang intinya tidak ada lagi kekhawatiran akan berbagai hal dalam pemerintahannya nanti didesa tersebut.

Lain halnya Menurut Dwiyanto, dkk (2002) untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-indikator kinerja yang meliputi :

1. Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa.

2. Tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi apabila terdapat masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
3. Dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan pengguna jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrasi.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas (Dadang, 2007), (Lalolo, 2003), (Manggaukang Raba, 2006), maka dapat disimpulkan bahwa indikator akuntabilitas kinerja yakni, Pengawasan, Akses publik, Keterbukaan, dan Sumber Daya.

#### **2.1.4. Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja**

Dalam menemukan faktor-faktor mempengaruhi kinerja penulis mencoba mengacu pada beberapa kerangka teori dan model yang dikembangkan oleh beberapa ahli. Dengan mengacu pada kerangka yang digunakan oleh para ahli pada penelitian kinerja organisasi.

Beberapa pandangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi publik, yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu, dapat ditemui dari berbagai kepustakaan yang berusaha menggambarkan kinerja organisasi publik. Suatu organisasi, terlepas dari bagaimana bentuknya organisasi tersebut, apapun tujuan yang akan tercapai semaksimal mungkin. Untuk mencapai target tersebut, banyak faktor yang dapat mempengaruhinya.

Muljarto (1997: 243) menyatakan bahwa: “organisasi bukanlah sistem yang tertutup melainkan organisasi tersebut akan selalu dipaksa untuk memberi tanggapan atas rangsangan yang berasal dari lingkungannya”. Pengaruh lingkungan dapat dilihat dari dua segi: pertama adalah lingkungan eksternal yang

umumnya menggambarkan kekuatan yang berada diluar organisasi seperti faktor politik, ekonomi dan sosial, kedua adalaah lingkungan internal yaitu faktor-faktor dalam organisasi yang menciptakan iklim organisasi dimana berfungsinya kegiatan mencapai tujuan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Higgins (Salusi, 1996: 65) menyatakan bahwa: “ada dua kondisi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu kapabilitas organisasi yaitu konsep yang dipakai untuk menunjuk pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan”. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yan memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategik dalam mencapai sasarannya; sedangkan kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Kedua faktor ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Faktor yang perlu diperhitungkan dalam melihat kemampuan internal organisasi antara lain: struktur organisasi, sumber daya baik dana maupun tenaga, lokasi, fasilitas yang dimiliki, integritas seluruh seluruh karyawan dan integritas kepemimpinan.

Kondisi yang kedua adalah lingkungan eksternal, yang terdiri atas dua faktor strategik, yaitu peluang dan ancaman atau tantangan. Peluang sebagai situasi dan faktor-faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai atau bahkan melampaui pencapaian sasarannya; sedangkan ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Dalam mengamati lingkungan eksternal, ada beerapa sektor yang peka secara strategik, artinya bisa menciptakan peluang, atau sebaliknya merupakan ancama. Perkembangan teknologi misalnya, peraturan perundang undangan, atau situasi



keuangan, dapat saja memberi keuntungan atau kerugian bagi organisasi. Tetapi yang jelas, peluang dan ancaman hadir pada setiap saat dan senantiasa melampaui sumber daya yang tersedia. Artinya, kekuatan yang dimiliki organisasi selalu berada dalam posisi lebih lemah dalam mengulangi ancaman, bahkan dalam mengejar dan memanfaatkan peluang sekalipun.

Sementara itu (Steers, 1980) menyatakan bahwa “faktor-faktor yang menyokong keberhasilan suatu organisasi dapat ditemukan dalam empat kelompok umum”. Keempat kelompok umum tersebut adalah:

1. Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi.

Yang dimaksudkan dengan struktur adalah hubungan yang relatif tetap sifatnya seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia. Struktur adalah cara unik suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi. Dengan demikian pengertian struktur meliputi faktor-faktor seperti luasnya desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, cakupan perumusan interaksi antar pribadi, dan seterusnya. Jadi, keputusan mengenai cara bagaimana orang-orang akan dikelompokkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Di lain pihak, yang dimaksud dengan teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi. Teknologi dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk variasi-variasi dalam proses mekanis yang digunakan dalam produksi, variasi dalam bahan yang digunakan dan variasi dalam pengetahuan teknis yang dipakai untuk menunjang kegiatan menuju sasaran.

2. Karakteristik lingkungan, mencakup dua aspek yaitu yang pertama adalah lingkungan ekstern, yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan didalam organisasi (contoh: kondisi ekonomi dan pasar, peraturan Pemerintah), yang kedua, adalah lingkungan intern, yang dikenal sebagai iklim organisasi meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja (contoh: pekerja sentris, orientasi pada prestasi) yang sebelumnya telah ditunjukkan mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas, khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual (contoh: sikap kerja, prestasi).
3. Karakteristik pekerja, perhatian harus diberikan kepada perbedaan individual antara pekerja dalam hubungannya dengan efektivitas. Pekerja yang berlaianan mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Variasi sifat manusia ini sering menyebabkan perilaku orang berbeda satu sama lain, walaupun mereka ditempatkan di satu lingkungan kerja yang sama. Lagi pula perbedaan-perbedaan individual ini dapat mempunyai pengaruh yang langsung terhadap dua proses yang penting, yang dapat berpengaruh nyata terhadap efektivitas. Yaitu rasa keterikatan terhadap organisasi atau jangkauan identifikasi para pekerja dengan majikannya, dan prestasi kerja individual. Tanpa rasa keterikatan dan prestasi, efektifitas adalah mustahil.
4. Kebijakan dan praktek manajemen, peranan manajemen dalam prestasi organisasi, meliputi variasi gaya, kebijakan dan praktek kepemimpinan dapat memperhatikan atau merintangai pencapaian tujuan. Peran manajer memainkan peran sentral dalam keberhasilan suatu perusahaan melalui

perencanaan, koordinasi, dan memperlancar kegiatan yang ditujukan kearah sasaran. Adalah kewajiban mereka untuk menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dengan dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Lagipula adalah tanggungjawab mereka untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga para pekerja dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil mengejar sasaran organisasi. Dengan makin rumitnya proses teknologi dan makin rumit dan kejamnya keadaan lingkungan, peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi tidak hanya bertambah sulit, tapi juga menjadi semakin penting artinya.

Untuk lebih meningkatkan kinerja dinas tersebut secara teoritis menyeluruh aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kinerja, Pertama aspek-aspek input atau sumberdaya-sumberdayanya antara lain :

1. Pengawasan sumber daya manusia;
2. anggaran;
3. sarana dan prasarana;
4. informasi;
5. budaya organisasi.

Kedua, hal yang berkaitan dengan proses manajemen dalam organisasi seperti :

1. proses perencanaan;
2. proses pengorganisasian;
3. proses pelaksanaan;
4. proses penganggaran;
5. proses pengawasan;

6. proses evaluasi dan sebagainya.

Setiap aspek tersebut mempunyai potensi yang sama untuk muncul sebagai faktor dominan yang mempengaruhi kinerja instansi Pemerintah, baik berpengaruh dalam arti negatif (menjadikan lemahnya kinerja), maupun yang positif (meningkatkan kinerja).

Disamping faktor internal tersebut, perlu juga diperhatikan aspek-aspek lingkungan eksternal secara langsung maupun tidak ikut mempengaruhi kinerjanya, seperti perubahan-perubahan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi, juga pihak-pihak yang terkait dengan penyediaan input, misalnya wajib pajak dan para pembuat kebijakan dan sebagainya.

Kapasitas organisasi dapat memberi kontribusi pada keberhasilan implementasi. Kemampuan organisasi akan dipengaruhi tiga hal pokok yaitu: struktur organisasi, personel dan finansial. Tiga hal tersebut bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain. Meskipun suatu kebijakan telah dirumuskan dengan jelas (yang memungkinkan untuk diimplementasikan secara mudah) akan tetapi mungkin saja bisa gagal oleh kelemahan struktur organisasi atau kelemahan sistem. Struktur yang ketat dan tersentralisir akan mendukung kepatuhan. Jika semua dalam kondisi sama (struktur, dsb) maka keberhasilan implementasi nampaknya akan sangat tergantung pada karakter dari tujuan kebijakan itu sendiri, jumlah staf yang memadai, ahli, dan mempunyai motivasi tinggi akan mempermudah proses konversi pesan kebijakan menjadi realita. Hal ini akan lebih berhasil lagi apabila juga didukung oleh kondisi finansial yang memadai.

## **2.2. Transparansi**

### **2.2.1. Pengertian Transparansi**

Menurut (Mardiasmo, 2006) transparansi adalah keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pendapat lain dikemukakan (Sedarmayanti, 2007) transparansi adalah bahwa individu, kelompok atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas diarahkan tanpa adanya kebohongan atau motivasi yang tersembunyi, dan bahwa seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi juga keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Adrianto, 2007). Sedangkan menurut (Tanjung, 2011) transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Kemudian transparansi menurut (Mursyidi, 2013) yaitu “memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur karena masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Dengan demikian dapat disimpulkan transparansi adalah adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai oleh organisasi dengan memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan dan rahasia negara.

Sedangkan transparansi jika dikaitkan dengan konsep pemerintahan khususnya dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah keterbukaan informasi yang menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pertanggungjawaban dalam bentuk publikasi melalui media elektronik berupa website.

### **2.2.2. Manfaat dan Tujuan Transparansi Laporan Keuangan**

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik, dapat diartikan bahwa transparansi

dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi.

Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam pengambilan kebijakan, dan dengan adanya keterbukaan informasi maka publik dapat ikut serta dalam memberikan aspirasi/suara dalam pengambilan keputusan meskipun hanya di beberapa komponen saja. Transparansi pula dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah.

Menurut (Adrianto, 2007), terdiri dari beberapa manfaat adanya transparansi yaitu, mencegah korupsi, lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga, meningkatnya kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk mememutuskan kebijakan tertentu, menguatnya kohesi sosial karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.

Selain itu (Medina, 2012), juga mengungkapkan ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan adanya transparansi keuangan, diantaranya yaitu

1. Dapat mengurangi ketidak pastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makro ekonomi sehingga penyesuaian di kemudian hari bisa diminimalisir.
2. Dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Legislatif, media, dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah lebih baik jika mereka memiliki informasi tentang kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, dan penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Para pejabat publik akan berlaku lebih bertanggung jawab jika keputusan yang diambil dilakukan secara terbuka atau transparan untuk publik dan dapat mencegah adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. Dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat, misalnya masyarakat bisa memahami kebijakan pemerintah dan bahkan mendukung kebijakan tersebut.
4. Dapat meningkatkan iklim investasi. Pemahaman yang jelas terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah akan mengundang investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk lebih berinvestasi.

Menurut (Adha, 2014) menjelaskan bahwa terdapat bentuk-bentuk transparansi yaitu :

1. Penyediaan informasi yang jelas.

Penyediaan informasi yang jelas sangat penting karena untuk mempermudah pihak-pihak pengakses informasi laporan keuangan agar tidak kesulitan.

2. Kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan.

Suatu organisasi wajib untuk menyediakan akses informasi yang sekiranya suatu informasi tersebut mudah untuk didapatkan oleh pihak yang membutuhkan informasi.

3. Meningkatkan arus informasi.

Menerapkan transparansi tidaklah mudah beberapa hambatan pasti akan muncul karena berbagai faktor, maka dari itu untuk menjaga kestabilan dalam penerpan transparansi dibutuhkan peningkatan arus informasi.



Informasi yang dimaksudkan adalah informasi yang terus menerus memberikan keupdetan data yang sekiranya dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan.

Menurut Sari (2017) manfaat penting adanya penerapan transparansi pelaporan keuangan adalah untuk mencegah korupsi, lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha, menguatnya kohesi sosial karena kepercayaan masyarakat terhadap suatu organisasi, meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.

Berbeda halnya dengan (Yesnita, 2016), bahwa manfaat dari transparansi adalah untuk menciptakan kemampuan penalaran publik dan mempertahankan tanggungjawab suatu organisasi atas tindakan, kebijakan, dan praktik yang dilakukannya.

Berdasarkan pendapat diatas, sehingga dapat disimpulkan manfaat dari transparansi adalah untuk mencegah agar tidak terjadi kecurangan dalam setiap aktivitas pada suatu organisasi.

Selanjudnya Sari (2017) menyebutkan tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat dirasakan oleh stakeholder dan lembaga yaitu untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial. Transparansi juga dapat digunakan untuk menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi, mendorong masyarakat untuk selalu bertanggungjawab terhadap pilihan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan, membangun kepercayaan atas seluruh pihak dari aktivitas

yang dilakukan dan tercapainya pelaksanaan aktivitas sesuai dengan ketentuan, prinsip, dan nilai-nilai universal.

Pendapat lain mengenai tujuan transparansi dijelaskan bahwa penerapan transparansi bertujuan agar dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan penggunaan dana, mencegah ketidakpercayaan publik, serta tercapainya tujuan (Yesnita, 2016). Pemaparan beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa tujuan transparansi yaitu untuk mencegah dan menghindari penyimpangan-penyimpangan ataupun kesalahan dalam sebuah organisasi guna tercapainya pelaksanaan kegiatan organisasi secara maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang terkait.

### **2.2.3. Dimensi Transparansi Laporan Keuangan**

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut (Mardiasmo, 2009) adalah sebagai berikut:

#### **1. Informativeness (Informatif)**

Informatif artinya pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Berikut ini indikator dari informatif diantaranya yaitu:

##### **a. Tepat waktu**

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik juga untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

b. Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material

c. Jelas

Informasi harus jelas sehingga bisa dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

d. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.

e. Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan harusnya bisa diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan begitu, daya banding berarti laporan keuangan bisa digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.

f. Mudah diakses

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. Openness (Keterbukaan),

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

### 3. Disclosure (Pengungkapan)

Pengungkapan pada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial. Berikut indikator dari pengungkapan diantaranya yaitu:

#### a. Kondisi Keuangan

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.

#### b. Susunan Pengurus

Komponen (unit kerja) dalam organisasi, struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).

#### c. Bentuk Perencanaan dan Hasil Kegiatan

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut (Rochman, 2008) Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.

Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi publik. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu:

Aspek pertama adalah komunikasi publik, komunikasi publik menuntut usaha afirmatif untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang

penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah atau organisasi, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “watchdog” atas berbagai berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi.

#### **2.1.4 Indikator transparansi**

Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Menurut (Krina, 2003) menyebutkan ada beberapa alat ukur transparansi yaitu :

1. Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi. Annual reports, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, koran lokal.
2. Informasi yang disajikan : acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.
3. Penanganan keluhan : berita-berita kota di media massa dan lokal, notice of respon, limit waktu respon, opinion pools & survey tentang isu-isu kebijakan publik, komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, service users surveys.
4. Institusi dan organisasi daerah : Bawasda, kantor PMD/BPM, kantor Humas, dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku.

5. Pertemuan masyarakat: Mimbar rakyat.

Selanjutnya indikator penilaian transparansi pelaporan keuangan adalah penyampaian informasi keuangan yang dirilis secara legal baik positif maupun negative, akurat, tepat waktu, seimbang dan tegas. Dan pencapaian kerja dari organisasi berupa input, output, outcome dan penyediaan akses stakeholder atas laporan keuangan (Arifian & Bowo, 2014).

Sedangkan menurut (Krina, 2003) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab
2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap
3. Kemudahan akses informasi
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Hanim (2009) juga mengemukakan bahwa indikator variabel dari Transparansi yaitu:

1. Pengelolaan Keuangan diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

Pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah diselenggarakan berdasarkan proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM) dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu.

2. Penyebar luasan laporan

Keuangan telah disampaikan melalui media. Informasi tentang laporan keuangan disampaikan melalui media televisi, radio dan koran.

3. Terdapat akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan.

Terdapat tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya dan kelengkapan informasi berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan.

4. Ada ketersediaan system informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai.

Ketersediaan system informasi akan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

5. Penyampaian Laporan Keuangan telah melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan.

Laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah disampaikan melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah agar para pengguna laporan keuangan dapat dengan mudah mendapatkan informasi keuangan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas mengenai indikator transparansi (Krina, 2009 dan 2003), (Hanim, 2009) maka disimpulkan bahwa transparansi yaitu : Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi, Kemudahan akses informasi, Penyediaan akses, dan Sistem pengendalian.

### 2.1.5 Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya daerah penerapan transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa hal berikut (Halmawati & Mustin, 2015):

1. Informasi mengenai keberhasilan pencapaian SKPD
2. Menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu
3. Menyediakan akses pada pemangku kepentingan
4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
5. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan

Kemudian Imagio dan Powell dalam (Noprizal, 2017) didalam teori pelaporan keuangan, Faktor yang mendorong munculnya transparansi laporan keuangan yaitu:

1. Pada saat mempublikasikan laporan keuangan secara transparan terdapat sejumlah variabel yang mempengaruhinya.
2. Tranparansi dalam pelaksanaan pelaporan keuangan juga dapat terjadi karena adanya perubahan lingkungan, situasi genting tentu membuat setiap informasi didalam struktur keuangan pemerintah dilakukan dengan sebenarnya benar-benar.



3. Pelaksanaan proses transparansi didalam pelaporan keuangan tentu akan muncul ketika seluruh anggota organisasi memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankannya. Komitmen menunjukkan ungkapan janji yang akan dilaksanakan didalam sebuah organisasi, komitmen tentu akan terwujud ketika masing masing pihak didalam organisasi menjalankan perannya dengan baik

Menurut (Ridha & Basuki, 2012) penerapan transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa hal berikut :

1. Informasi mengenai keberhasilan pencapaian OPD,
2. Menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu,
3. Menyediakan akses kepada pemangku kepentingan,
4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembaran muka laporan keuangan,
5. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi penerapan transparansi keuangan adalah sistem pengendalian intern. Menurut (Rai, 2008) Sistem pengendalian Intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarnya.

Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas jika pemerintah daerah terus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya (Hahenus, 2015). Aksesibilitas laporan

keuangan dapat ditingkatkan dengan cara memfasilitasi berbagai pihak berkepentingan dan masyarakat untuk memperoleh informasi laporan keuangan dengan mudah. Oleh karena itu pemerintah, berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik bagi orang-orang yang berkepentingan.

## **2.3. Teknologi Informasi**

### **2.3.1. Pengertian Teknologi Informasi**

Teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer (Sutarman, 2012)

Menurut (Sutabri, 2012) “Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambil keputusan.

Selanjutnya (Mulyadi 2014) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah mencakup komputer (baik perangkat keras dan perangkat lunak), berbagai peralatan kantor elektronik, perlengkapan pabrik dan telekomunikasi.”

Definisi teknologi informasi menurut (Kadir & Triwahyuni 2013) adalah studi penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar”.

Beberapa definisi dari para ahli dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi berbasis komputer untuk mengolah data menjadi informasi yang berkualitas sehingga berguna untuk pengambilan keputusan.

### **2.3.2. Tujuan dan Fungsi Teknologi Informasi**

Sutarman (2012:17), mengemukakan tujuan dari teknologi informasi adalah, untuk memecahkan masalah, untuk membuka kreativitas dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

Teknologi informasi menurut Sutarmn (2012:18) memiliki fungsi untuk menyatakan catatan rinci dari aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi, pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubahan data ke bentuk lain), analisis (analisis kondisi), perhitungan (kalkulasi), sintesis (penggabungan) segala bentuk data dan informasi.

Menurut Kadir (2014:12), juga mengemukakan bahwa fungsi teknologi informasi adalah:

1. Untuk menggantikan peran manusia. dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomatis terhadap suatu tugas atau proses.
2. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.
3. Teknologi informasi berperan dalam restrukturasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses

### 2.3.3. Indikator Teknologi informasi

Nur Maflikhah (2010) memberikan beberapa dimensi tentang kemanfaatan teknologi informasi. Kemanfaatan dengan estimasi dua faktor dibagi menjadi dua kategori lagi yaitu kemanfaatan dan efektivitas, dengan dimensi-dimensi masing-masing yang dikelompokkan sebagai berikut :

#### 1. Kemanfaatan

- a. Menjadi pekerjaan lebih mudah (makes job easier)
- b. Bermanfaat (usefull)
- c. Menambah produktifitas (increas productivity).

#### 2. Efektivitas

- a. Mempertinggi efektifitas (enchance effectiveness)
- b. Mengembangkan kinerja pekerjaan (improve the job performance)”.  
performance)”.

Kemanfaatan dari penggunaan teknologi informasi itu sendiri dapat diketahui dari kepercayaan pengguna teknologi informasi dalam memutuskan penerimaan teknologi informasi dengan satu kepercayaan bahwa pengguna teknologi informasi tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi penggunanya.

Adapun alat ukur dari Teknologi Informasi dapat diukur melalui komponen teknologi informasi menurut (Suyanto, 2005) yaitu:

#### 1. Perangkat Keras Komputer Hardware

Perangkat keras bagi sesuatu system informasi terdiri atas masukan dan keluran. Sebagai unit meyimpan file dan sebagainya, peralatan, penyiapan data dan terminal masukan dan keluaran.

## 2. Perangkat Lunak Komputer Software

Seperti system perangkat lunak yang dikembangkan guna mendukung pendistribusian data dan informasi seperti system pengoprasian. Dikembangkan juga beberapa metode dan aplikasi dan sistem yang berbasis computer untuk memenuhi kebutuhan pengguna Contohnya: e-commerce, DSS Decision Support System, e- banking, SAP, dan sebagainya.

## 3. Jaringan dan Komunikasi

Jaringan dan komunikasi merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan dan menggabungkan beberapa titik komunikasi menjadi satu kesatuan yang mampu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Berbagai macam cara digunakan untuk memepermudah dan menjaga kualitas kualitas hubungan melalui internet. Sejak saat itulah perkembangan alat-alat yang menyokong kemampuan jaringan untuk saling berhubungan berjalan dengan pesat.

## 4. Database

wadah atau file yang berisikan program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan fisik dari proses penggunaan sistem.

## 5. Personalia Teknologi Informasi

Adanya operator computer, analis system, pembuat program, personalia penyiapan data, pemimpin system informasi.

Kemudian William Sawyer 2007:4-5 menyatakan bahwa Teknologi Informasi terdiri dari dua komponen yaitu

### 1. Teknologi Komputer

Meesin yang bisa diprogram dan memiliki beragam fungsi untuk menerima data, baik data mentah maupun angka, lalu memproses dan mengubahnya ke dalam bentuk informasi yang bisa kita manfaatkan.

## 2. Teknologi Komunikasi

Terdiri dari sistem dan peralatan elektromagnetik untuk berkomunikasi jarak jauh yang terhubung melalui sumber informasi melalui jaringan. Jaringan itu adalah sistem komunikasi yang menghubungkan dua komputer atau lebih.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa alat ukur dari Teknologi Informasi dapat diukur melalui komponen teknologi informasi menurut M. Suyanto 2005:11 yaitu, Perangkat Keras computer Hardware, Perangkat Lunak Komputer Software, Jaringan dan Komunikasi, Database, Personalia Teknologi Informasi

### **2.4.Sistem Pengendalian Intern**

#### **2.4.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern**

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing.

Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai

tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2016: 20).

Menurut PP No. 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sedangkan menurut Mayangsari & Wandanarum (2013:59): “Pengendalian internal adalah penggunaan semua sumber daya perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai.”

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang terstruktur serta kumpulan berbagai komponen pengendalian dan aktivitas operasional organisasi/perusahaan yang terintegrasi dan digunakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang dapat dilihat dari terciptanya keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, keamanan kekayaan organisasi serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal yang efektif merupakan komponen kritis yang digunakan manajemen dan dasar bagi kegiatan operasional yang aman dan sehat dalam sebuah organisasi/perusahaan.

#### **2.4.2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern**

Tujuan penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif, sedangkan tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern menurut Mahmudi (2010:20) adalah :



1. Untuk melindungi aset (termasuk data) Negara
2. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
3. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
4. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
5. Untuk efisiensi dan efektifitas operasi
6. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku

Pendapat lain juga menyatakan, Arens (2008:316), tujuan pengendalian intern adalah :

1. Keandalan Laporan Keuangan.

Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesional untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan seperti General Accepted Accounting Principle (GAAP).

2. Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi.

Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Perusahaan publik, perusahaan non publik, maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk mematuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa

“Pengendalian internal bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan menurut Menurut Mulyadi (2010:163) “Tujuan Sistem Pengendalian Internal” adalah untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, Mendorong efesiens, dan Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

### **2.4.3. Indikator Sitem Pengendalian Intern**

Dalam hal pencapaian keberhasilan dalam penerapan pengendalian internal maka harus diperhatikan juga unsur-unsur pengendalian internal. Adapun beberapa unsur pengendalian internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui
  - a. Penegakan integritas dan nilai etika
  - b. Komitmen terhadap kompetensi
  - c. Kepemimpinan yang kondusif
  - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
  - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
  - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
  - h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
2. Penilaian Risiko Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:
- a. Tujuan Instansi Pemerintah Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.
  - b. Tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah
    - 2) Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya
    - 3) Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah
    - 4) Mengandung unsur kriteria pengukuran
    - 5) Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup

- 6) Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.
3. Kegiatan Pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas:
  - a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
  - b. Pembinaan sumber daya manusia
  - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
  - d. Pengendalian fisik atas asset
  - e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
  - f. Pemisahan fungsi
  - g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
  - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
  - i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
  - j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
  - k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
4. Informasi dan Komunikasi Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus menyediakan dan

memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui :

a. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

b. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Dan Reviu Lainnya

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Sedangkan Menurut Mulyadi (2010: 427-428) “Unsur-unsur Pengendalian Internal kas” adalah, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab

fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit dan organisasi, dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Menurut (Indra Bastian, 2011) bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam peraturan pemerintah ini mengacupada unsur sistem pengendalian intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai negara, yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

## 2.5. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai bahan acuan dalam penyusunan penelitian ini yang di uraikan pada tabel berikut ini.

**Tabel. 2.1**

### Penelitian Terdahulu

<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
(Amran, 2019)	Pengaruh Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah: Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palopo	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA)
(Cholis & Fadli, 2017)	Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas Publik Dan Kinerja Instansi Pemerintah	Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja; Sistem pengendalian intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja; Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja.

<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
(Nauap, Ulfah, & Setiawaty, 2016)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pengendalian Intern berpengaruh Signifikan dan Positif terhadap Kinerja Instansi.
(Nugraha, 2011)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern (lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian, dan pemantauan pengendalian intern) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi aset tetap di pemerintah.
(Sari, Mulyani, & Budiarto, 2020)	Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil analisis menunjukkan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola laporan keuangan daerah; Kontrol internal memiliki dampak signifikan pada transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola laporan keuangan regional.
(Setiawan & Safri, 2016)	Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Bungo	Secara parsial akuntabilitas publik, transparansi publik, pengawasan, dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah. Secara simultan akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Secara parsial akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah bukan merupakan variabel intervening dalam penelitian ini

<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
(Sari, Muhyarsyah, & Wahyuni, 2020)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Secara simultan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ketersediaan anggaran dan efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
(Astuty, 2016)	Peran Auditor Internal Dan Pengendalian Intern Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Secara simultan dan parsial peran auditor internal dan Pengendalian intern Berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
(Purba & Amrul, 2018)	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar	Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah
(Wardani & Andriyani, 2017)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Sementara itu, pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa
(Wintari & Suardana, 2018)	Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Organisasi Pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal, pengendalian internal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen organisasi berpengaruh positif yang signifikan pada transparansi pelaporan keuangan



## **2.6.Kerangka Konsep**

Kerangka konseptual merupakan penjelasan tentang bagaimana teoriberhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalahyang penting.

### **2.6.1. Keterkaitan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinejerja Keuangan**

Menurut (Sutabri, 2012) “Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambil keputusan. Teknologi informasi adalah suatu teknologi berbasis komputer untuk mengolah data menjadi informasi yang berkualitas sehingga berguna untuk pengambilan keputusan.

Dengan demikian Kinerja Organsasi Perangkat Daerah (OPD) harus didukung dengan teknologi informasi yang memadai, yang dapat digunakan untuk memudahkan kegiatan operasional organisasi dan pencapaian kinerja yang akuntabel.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pencapaian akuntabilitas kinerja yang baik dipengaruhi berbagai factor. Salah satu factor yang mempengaruhi pencapaian akuntabilitas kinerja adalah Teknologi informasi. Menurut (Steers, 1980) menyatakan bahwa “faktor-faktor yang menyokong keberhasilan suatu organisasi adalah Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan penggunaan teknologi dalam organisasi. Dengan demikian dapat diketahui keterkaitan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja yaitu pada kemanfaatan teknologi tersebut. Pemanfaatan teknologi yang efektif dan efisien akan mendukung tercapainya pelaksanaan kegiatan yang berakuntabilitas.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Amran, 2019) dalam penelitiannya bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA). Kemudian dikuatkan kembali oleh penelitian yang dilakukan oleh (Cholis & Fadli, 2017) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Dengan demikian Pemanfaatan teknologi informasi yang baik erat hubungannya dengan pencapaian akuntabilitas kinerja organisasi

### **2.6.2. Keterkaitan Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Menurut Indra Bastian (2010:385) Akuntabilitas Publik adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah perkara yang mudah dikarenakan berbagai factor yang dapat menghambat pelaksanaan akuntabilitas kinerja publik. Ada dua kondisi yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja organisasi, yaitu kapabilitas organisasi yaitu konsep yang dipakai untuk menunjuk pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan”. Kondisi yang kedua adalah lingkungan eksternal, yang terdiri atas dua faktor stratejik, yaitu peluang dan ancaman atau tantangan.

Atas hal tersebut diperlukan adanya sebuah sistem yang dapat dipergunakan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan dan memberikan pengendalian dan peningkatan terhadap aktifitas kegiatan pemerintahan. Menurut Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui keberadaan sistem pengendalian intern bertujuan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan prosedur dan tujuan. Dengan artian lain akuntabilitas kinerja akan terlaksana apabila dalam pelaksanaan tersebut telah terdapat system pengendalian intern yang memadai.

Hal tersebut sejalan dengan beberapa hasil penelitian yang dilakukan para peneliti terdahulu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amran, 2019), (Cholis &

Fadli, 2017), dan (Nauap, Ulfah, & Setiawaty, 2016) menyatakan bahwa Sistem pengendalian intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja. Dengan demikian data dikatakan bahwa dalam pencapaian akuntabilitas kinerja baik diperlukan adanya suatu system pengendalian intern yang dapat mendukung dan memberikan evaluasi serta pengendalian atas berjalannya suatu kegiatan organisasi baik swasta maupun pemerintah.

### **2.6.3. Keterkaitan Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Transparansi Laporan Keuangan**

Penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk memecahkan masalah, untuk membuka kreativitas dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Teknologi informasi menurut Sutarman (2012:18) memiliki fungsi untuk menyatakan catatan rinci dari berbagai aktivitas,

Dengan adanya penggunaan teknologi informasi yang baik pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang baik dan pencapaian akuntabilitas kinerja akan mudah dilaksanakan. Dalam suatu lingkup organisasi publik, Salah satu pencapaian pelaksanaan kegiatan yang harus diterapkan adalah ketransparansian yang berupa keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait kegiatan pemerintah yang dilaksanakan.

Dengan adanya penggunaan teknologi informasi yang memadai penyampaian informasi tersebut diharapkan dapat terlaksana sehingga memudahkan para pihak eksternal atau pemegang kepentingan untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Ridha & Basuki, 2012) penerapan transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh ketersediaan akses

kepada pemangku kepentingan, kases informasi yang dimaksud adalah suatu teknologi yang mampu menyampaikan informasi secara actual dan dapat dipercaya kepada masyarakat.

#### **2.6.4. Keterkaitan Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Laporan Keuangan**

Transparansi menurut (Mursyidi, 2013) yaitu “memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur karena masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan.”

Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah yang transparan diperlukan adanya suatu sistem pengendalian intern yang di gunakan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pemerintah yang transparan. Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2016: 20).

Ketercapaian suatu system pengendalian intern dalam memberikan pengawasan pengendalian terhadap kegiatan pemerintah yang transparan dapat dilat dari pelaksanaan aspek lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha, 2011) bahwa sistem pengendalian intern (lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian, dan pemantauan pengendalian intern) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi aset tetap di pemerintah. Kemudian hasil serupa ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Sari, Mulyani, & Budiarto, 2020) bahwa kontrol internal memiliki dampak signifikan pada transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola laporan keuangan regional.

#### **2.6.5. Keterkaitan Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas**

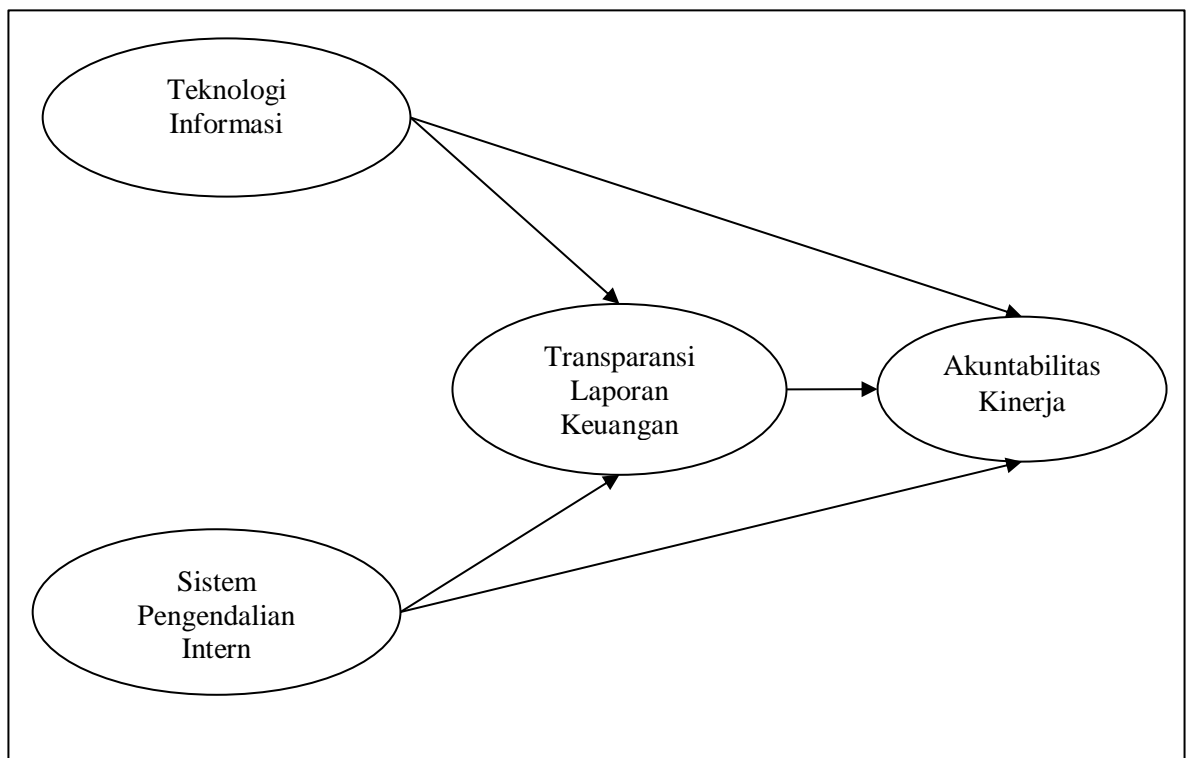
Pelaksanaan kinerja yang berakuntabilitas tidak bias terlepas dari aspek-aspek yang yang mempengaruhinya. Salah satu bentuk dari pelaksanaan kinerja yang berakuntabilitas adalah ketransparansian. Ketransparansian yang dimaksud dalam hal ini adalah keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada public terkait kegiatan pemerintahan. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan kegiatan yang transparan merupakan salah satu bentuk telah tercapainya pelaksanaan kegiatan yang berakuntabilitas.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Setiawan & Safri, 2016) dengan hasil yang menunjukkan bahwa transparansi publik dan pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah.

Pendapat lain dikemukakan (Sedarmayanti, 2007) transparansi adalah bahwa individu, kelompok atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas diarahkan tanpa adanya kebohongan atau motivasi yang tersembunyi, dan bahwa seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan. Dengan demikian

penerapan pemerintahan yang transparan merupakan bentuk terciptanya akuntabilitas kinerja yang baik.

Dalam memberikan gambaran dalam kerangka konseptual pada bagian ini dapat dikembangkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konsep**

## **2.7. Hipotesis**

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara bagaimana pengaruh antara variabel bebas, variabel intervening dan variabel terikat dalam penelitian ini:

1. Teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.
2. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.

3. Teknologi informasi berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan.
4. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan
5. Transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.
6. Transparansi laporan keuangan memediasi pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.
7. Transparansi laporan keuangan memediasi pengaruh system pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012).

Penelitian ini juga termasuk penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional. Metode korelasi adalah metode pertautan atau metode penelitian yang berusaha menghubungkan-hubungkan antara satu unsur/elemen dengan unsur/elemen lain untuk menciptakan bentuk dan wujud baru yang berbeda dengan sebelumnya (Sugiyono, 2014).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode asosiatif. Menurut (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2014) pendekatan assosiatif adalah pendekatan korelasional dengan menggunakan dua atau lebih variabel guna mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan di bantu dengan program Statistik.

#### **3.2. Definisi Operasional**

Dalam menjelaskan variabel-variabel yang sudah diidentifikasi, maka dibuatlah definisi operasional dari masing-masing variabel sebagai upaya pemahaman dalam penelitian.

Penelitian ini terdiri atas dua model, pada model pertama yang menjadi variabel endogen adalah Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y1), dengan variabel eksogen terdiri atas, Teknologi Informasi (X1), Sitem Pengendalian Intern (X2) dan Transparansi Laporan Keuangan (Z). Sedangkan pada model yang kedua, yang menjadi variabel endogen adalah Transparansi Laporan Keuangan (Z) dengan variabel eksogen Teknologi Informasi (X1), Sitem Pengendalian Intern (X2).

**Table 3.1**

**Defenisi Operasional**

<b>Variabel</b>	<b>Pengertian</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Akuntabilitas	Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya” (Penny Kusumastuti 2014). (Dadang, 2007), (Lalolo, 2003), (Manggaukang Raba, 2006)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan</li> <li>2. Akses Publik</li> <li>3. Keterbukaan</li> <li>4. Sumber Daya</li> </ol>	Ordinal
Transparansi	Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. (Krina, 2009 dan 2003), (Hanim, 2009)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi kebijakan publik,</li> <li>2. Kemudahan akses informasi.</li> <li>3. penyediaan akses</li> <li>4. sistem pengendalian</li> </ol>	Ordinal



### 3.4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Binjai dengan jumlah 36 OPD.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2015). Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan total *sampling/ complete enumeration*, jadi seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian, yaitu 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Binjai dimana setiap OPD akan diambil 3 (tiga) orang responden yaitu Kasubbag Program, Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran berjumlah total sebanyak 108 orang yang diuraikan pada Tabel 3.3. berikut ini

**Tabel 3.3**

#### **Organisasi Perangkat Daerah Kota Binjai**

<b>No</b>	<b>Organisasi Peragkat Daerah (OPD)</b>
1	Sekretariat Daerah Kota Binjai
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai
3	Inspektorat Daerah Kota Binjai
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai
5	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
7	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
9	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai
10	Dinas Pendidikan Kota Binjai
11	Dinas Kesehatan Kota Binjai
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai
13	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai
14	Dinas Pariwisata Kota Binjai

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Binjai
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
17	Dinas Sosial Kota Binjai
18	Dinas Perhubungan Kota Binjai
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
20	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
21	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
24	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
26	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
27	Dinas Perpustakaan Kota Binjai
28	Kecamatan Binjai Utara
29	Kecamatan Binjai Kota
30	Kecamatan Binjai Timur
31	Kecamatan Binjai Selatan
32	Kecamatan Binjai Barat
33	Perusahaan Daerah Air Minum Tirtasari Kota Binjai
34	Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai
35	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Binjai
36	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai

Sumber : Data Pemerintah Daerah Kota Binjai

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber (tidak melalui sumber perantara) dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, yang berarti diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner (daftar pertanyaan) merupakan alat komunikasi antara peneliti dengan yang diteliti (responden) yang dibagikan oleh peneliti untuk diisi oleh responden. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. (Sudaryono, 2017).

**Tabel 3.4**  
**Skala Likert**

No.	Kategori Jawaban Pertanyaan/Pernyataan	Skor
1	Tidak Memadai/Tidak Sesuai	1
2	Kurang Memadai/Kurang Sesuai	2
3	Cukup Memadai/Cukup Sesuai	3
4	Memadai/Sesuai	4
5	Sangat Memadai/Sangat Sesuai	5

Sumber : (Sugiyono, 2010)

### 3.5.1. Uji Instrumen

Sebelum dilakukan pengumpulan data melalui kuesioner, terlebih dahulu dilakukan pengujian instrumen melalui uji validitas (*test of validity*) dan uji reliabilitas (*test of reliability*).

Pada penelitian ini pengujian instrumen dilakukan di 9 Kedinasan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal, dengan mengambil sampel sebanyak 5 orang dari setiap kedinasan dan berjumlah keseluruhan sebanyak 45 orang yang di uraikan pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5

**Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal**

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Inspektorat Daerah
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Dinas Pariwisata
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Dinas Sosial
9	Badan Kepegawaian Daerah

Sumber: Data Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal

### 1. Uji Validitas

Menurut (Sugiyono, 2012) Valid berarti instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.

*Diskriminant Validity* (validitas diskriminan) adalah sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik). Untuk mengukur validitas diskriminan dapat dilihat dari, *Fornell-Larcker Cirteiron*, *Cross Loadings*, *Heretroit-Monotrait Ratio* (HTMT). Dalam website smartpls, pengukuran terbaru yang terbaik adalah melihat nilai *Heretroit-Monotrait Ratio* (HTMT). Jika nilai HTMT < 0,90 maka suatu konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik (Juliandi, 2018).

Tabel 3.6

**Heroit-Monotrait Ratio (HTMT)**

	Teknologi Informasi (X1)	Sistem Pengendalian Intern (X2)	TransParansi Laporan Keuangan (Z)	Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y))
Teknologi Informasi (X1)				
Sistem Pengendalian Intern (X2)	0.325			
TransParansi Laporan Keuangan (Z)	0.547	0.433		
Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y)	0.662	0.697	0.766	

Sumber diolah Tahun 2022

Berdasarkan gambar pada tabel 3.6 diatas diperoleh hasil bahwa nilai *Heroit-Monotrait Ratio* (HTMT). Jika nilai *Heroit-Monotrait Ratio* (HTMT) darisuatu variabel konstruk  $< 0,90$  maka suatu variabel konstruk adalah valid. Dari hasil pegujian validitas diskriminan, seluruh variabel konstruk memiliki nilai *Heroit-Monotrait Ratio* (HTMT) lebih kecil dari 0,90. Maka seluruh variabel konstruk pada penelitian ini adalah valid.

Selain itu, untuk mengukur validitas pada suatu konstruk juga dapat dilihat dari perolehan nilai outer loading. (*Outer loading*). Jika nilai dari outer loading lebih besar dari (0.7) maka suatu indikator adalah valid (Nunnaly, Bernstein, Trinchera, & Amato dalam Juliandi, 2018).



**Tabel 3.7**  
**Outer Loading**

Variabel	Indikator	Teknologi Informasi	Sistem Pengendalian Intern	Kualitas laporan Keuangan (Y)	Akuntabilitas Kinerja Keuangan
Teknologi Informasi	X1.1	0.952			
	X1.2	0.958			
	X1.3	0.947			
	X1.4	0.952			
	X1.5	0.915			
	X1.6	0.952			
	X1.7	0.932			
	X1.8	0.958			
Sistem Pengendalian Intern	x2.1		0.948		
	x2.2		0.958		
	x2.3		0.946		
	x2.4		0.952		
	x2.5		0.945		
	x2.6		0.972		
	x2.7		0.967		
	x2.8		0.965		
Transparansi Laporan Keuangan	Z.1			0.920	
	Z.2			0.924	
	Z.3			0.931	
	Z.4			0.919	
	Z.5			0.893	
	Z.6			0.908	
	Z.7			0.916	
	Z.8			0.927	
Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Y.1				0.922
	Y.2				0.924
	Y.3				0.944
	Y.4				0.913
	Y.5				0.920
	Y.6				0.898
	Y.7				0.929
	Y.8				0.939

Sumber diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 3.7 diatas diketahui nilai loading faktor (*Outer Loading*) dari seluruh variabel konstruk lebih besar dari (0,7). Dengan demikian seluruh variabel konstruk yang di gunakan dalam memprediksi variabel laten adalah valid.

## 2. Uji Reliabilitas (Construk Reliability)

*Construct reliability* dan *validity* adalah pengujian untuk mengukur kehandalan suatu konstruk. Kehandalan skor konstruk harus cukup tinggi. Kriteria reliability dan validity dapat dilihat dari *Cronbach Alpha* > 0,7 (Nunnaly, Bernstein, Trinchera, & Amato dalam Juliandi, 2018), *Rho\_A* > 0.7 (Vinzi, Trinchera & Amato dalam Juliandi, 2018), *Composite Reliability* > 0,6 (Bagozzi, Yi, Chin & Dibbern dalam Juliandi 2018), *Average Variance Extracted (AVE)* > 0,5 (Fornell & Larcker dalam Juliandi 2018).

**Tabel 3.5**

### Uji Instrumen (Construk Reability and validity)

	<b>Cronbach's Alpha</b>	<b>rho_A</b>	<b>Reliabilitas Komposit</b>	<b>Rata-rata Variar Diekstrak (AVE)</b>
X1	0,983	0,985	0,985	0,894
X2	0,987	0,988	0,989	0,915
Z	0,973	0,974	0,977	0,841
Y	0,975	0,976	0,979	0,853

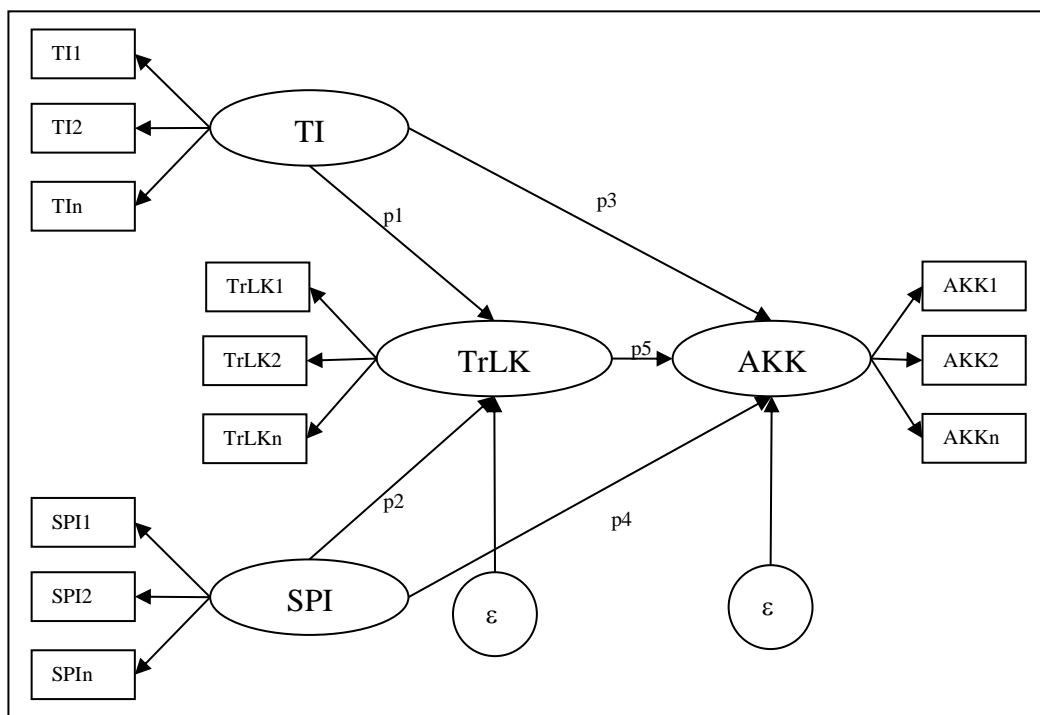
Sumber: Diolah tahun 2022

Berdasarkan data Construct Reliability dan validity pada tabel 3.5 diperoleh hasil bahwa variabel X1, X2, Z, dan Y memiliki nilai *Cronbach Alpha* dan *Rho\_A* > 0.7, nilai *Composite Reliability* > 0,6 dan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* > 0,5. Maka seluruh indikator instrumen variabel yang digunakan adalah *Valid*.

### 3.6. Teknik Pengolahan Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif dengan menggunakan metode statistik. Metode statistik yang digunakan adalah *Partial Least Square (PLS)*. *Partial least Square* merupakan metode analisis yang powerful karena tidak didasarkan banyak asumsi (Noor, 2015). Sebagai teknik analisis data, PLS menggunakan *software SmartPLS* versi 2.0.M3.

Metode PLS mempunyai keunggulan tersendiri diantaranya, data tidak harus berdistribusi normal *multivariate* (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai rasio dapat digunakan pada model yang sama) dan ukuran sampel tidak harus besar (Noor, 2015). Visualisasi model struktural untuk penelitian ini terlihat di dalam gambar 3.1 berikut;



**Gambar 3.1. Model Struktural**

Langkah-langkah dalam menganalisis data dan pemodelan persamaan struktural dengan menggunakan *software* Smart-PLS adalah sebagai berikut: (1) analisis model struktural (*inner model*); (2) Analisis model pengukuran (*outer model*).

### **3.6.1. Analisis model pengukuran (*Outer Model*)**

Analisis model pengukuran (*Outer Model*) bertujuan untuk mengevaluasi variabel konstruk yang diteliti, validitas (ketepatan), dan reliabilitas (kehandalan) dari suatu variabel.

#### *1. Construct Reliability dan Validity*

*Construct reliability* dan *validity* adalah pengujian untuk mengukur kehandalan suatu konstruk. Kehandalan skor konstruk harus cukup tinggi. Kriteria *reliability* dan *validity* dapat dilihat dari *Cronbach Alpha*  $> 0,7$  (Nunnaly, Bernstein, Trinchera, & Amato dalam Juliandi, 2018), *Rho\_A*  $> 0.7$  (Vinzi, Trinchera & Amato dalam Juliandi, 2018), *Composite Reliability*  $> 0,6$  (Bagozzi, Yi, Chin & Dibbern dalam Juliandi 2018), *Average Variance Extracted* (AVE)  $> 0,5$  (Fornell & Larcker dalam Juliandi 2018).

#### *2. Diskriminant Validity*

*Diskriminant Validity* (validitas diskriminan) adalah sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik). Untuk mengukur validitas diskriminan dapat dilihat dari, *Fornell-Larcker* *Cirteiron*, *Cross Loadings*, *Heretroit-Monotrait Ratio* (HTMT).

Namun demikian, dalam website SmartPLS, pengukuran terbaru yang terbaik adalah melihat nilai *Heretroit-Monotrait Ratio* (HTM). Jika nilai HTMT  $< 0,90$  maka suatu konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik (Jorg Henseler Christian, M. Ringle, & Marko Sarsted dalam Juliandi 2018).

### **3.6.2 Analisis Model Struktural (*Inner Model*)**

Analisis model struktural atau (*inner model*) bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian. Bagian yang perlu dianalisis dalam model struktural yakni, koefisien determinasi (R-Square) dan pengujian hipotesis. Koefisien determinasi (*R-Square*) bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan prediksi suatu model. Dengan kata lain untuk mengevaluasi bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas pada sebuah model jalur. Jika nilai  $R^2 = 0,75$  maka model adalah subsatansial (kuat), jika  $R^2 = 0.50$  maka model adalah moderate (sedang), jika  $R^2 = 0,25$  maka model adalah lemah (Juliandi, 2018)

### **3.6.3 $f^2$ ( $f^2$ -Square)**

F-Square adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relative dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Perubahan nilai F-Square saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan memiliki dampak yang substantive pada konstruk endogen. Kriterianya jika  $f^2 = 0.02$  mengindikasikan efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap variabel endogen, jika  $f^2 = 0,15$  mengindikasikan efek yang sedang dari variabel eksogen terhadap variabel endogen, jika  $f^2 = 0,35$  mengindikasikan efek yang besar dari variabel eksogen terhadap variabel endogen (Cohen dalam Juliandi 2018).

### 3.6.4 Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Analisis *direct effect* berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Kriteria pengukuran pengaruh langsung dapat menggunakan nilai dari koefisien jalur (*Path Coefficient*). Jika nilai koefisien jalur adalah positive maka nilai dari suatu variabel terhadap variabel lainnya adalah searah sehingga jika nilai suatu variabel eksogen meningkat, maka nilai dari variabel endogen akan meningkat. Jika nilai koefisien jalur adalah negative maka pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya adalah berlawanan arah, sehingga jika nilai variabel eksogen meningkat maka nilai variabel endogen akan menurun. (Juliandi, 2018).

### 3.6.5 Pengaruh Tidak langsung (*Indirect Effect*)

Analisis *Indirect Effect* berguna untuk menguji hipotesis pengaruh tidak langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap suatu variabel yang dipengaruhi (endogen) yang dimediasi oleh suatu variabel intervening (mediator). Kriteria pengukuran pengaruh langsung dapat dilihat melalui nilai P-value. Jika nilai P-value  $< 0,05$  maka signifikan, artinya variabel mediator memediasi pengaruh suatu variabel eksogen terhadap suatu variabel endogen dengan kata lain pengaruhnya tidak langsung. Jika nilai P-value  $> 0.05$  maka tidak signifikan, artinya variabel mediator tidak dapat memediasi pengaruh antara variabel eksogen terhadap vvariabel endogen, dengan kata lain pengaruhnya adalah langsung (Juliandi, 2018).

### 3.6.6 Total effect

*Total effect* merupakan total dari Direct Effect dengan Indirect Effect. (Juliandi, 2018). pengaruh total (Total Effect) dari pengaruh langsung (direct effect) dengan pengaruh tidak langsung (indirect effect) dapat di lihat dari nilai terbesar pengaruh variabel bebas (x) dan nilai terbesar dari P-value.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Binjai**

Posisi Kota Binjai cukup strategis untuk menjadikannya berkembang pesat sebagai kota perdagangan karena terletak di jalur lintas Sumatera. Jalur ini menghubungkan Kota Binjai dengan kota atau kabupaten lain di Sumatera Utara, seperti Kota Medan, Kabupaten Langkat, dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Selain dikenal sebagai kota dagang, Binjai juga dikenal sebagai kota penghasil rambutan. Luas areal perkebunan rambutan di Kota Binjai saat ini mencapai 425 Ha dengan jumlah produksi sekitar 2.400 ton per tahun. Selain sebagai buah segar, buah rambutan juga diolah menjadi selai atau buah kaleng.

Beberapa potensi wilayah dari Kota Binjai ini adalah di sektor pertanian, terutama tanaman padi, dimana pada tahun 2002 jumlah produksinya mencapai 22.266 ton. Walaupun hasil pertanian ini cukup potensial (kegiatan perekonomian terbesar ketiga di Kota Binjai), namun demikian sektor yang lebih menonjol dalam kegiatan perekonomian daerah adalah sektor industri pengolahan dan perdagangan. Sedangkan potensi peternakan, sebagian besar penghasil ternak di Kota Binjai adalah berada di Kecamatan Binjai Selatan.

Secara geografis wilayah Kota Binjai berada antara 3° 31' 40" - 3° 40' 2" Lintang Utara dan 98° 27' 3" - 98° 32' 32" Lintang Selatan dengan luas wilayah 90,23 km<sup>2</sup>.



Penduduk Kota Binjai yang merupakan angkatan kerja, sebagian besar adalah laki-laki yang bekerja, sebanyak 57.128 orang. Sedangkan sebagian besar penduduk Kota Binjai yang perempuan bukan angkatan kerja mempunyai kegiatan mengurus rumah, yaitu sebanyak 28.269 orang. Nilai ini hampir sebanding dengan jumlah penduduk perempuan Kota Binjai yang bekerja, yaitu sebanyak 28.784 orang.

Sentra-sentra perdagangan hampir merata terdapat di setiap kecamatan, dengan pusat perdagangan terdapat di Kecamatan Binjai Kota. Jumlah usaha perdagangan di kota ini mencapai 2.064, dengan dominasi usaha perdagangan kecil sebanyak 1.729 usaha (83,7%). Sementara, jumlah usaha industri mencapai 462 unit industri non formal dan 305 unit industri formal. Hasil-hasil industri yang menjadi unggulan adalah industri anyaman bambu, konveksi, kerupuk, mebel bambu, selai, tepung, manisan buah, terasi, sepatu/sandal, dan tahu/tempe.

#### **4.1.2. Deskripsi Data Hasil penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemerolehan data melalui penyebaran kuisisioner pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Binjai yang terdiri dari 36 OPD.

Dalam pengisian kuisisioner, masing-masing responden diminta untuk mengisi identitas diri sesuai dengan yang terdapat dalam kuisisioner. Setiap responden diminta untuk memberikan tanggapan yang terbagi dalam lima kategori penilaian yaitu, Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Tidak Baik, dan Sangat Tidak Baik atas pernyataan-pernyataan yang di ajukan peneliti dalam kuisisioner. Kuisisioner penelitian yang disebarkan peneliti berjumlah 108 kuisisioner dengan tingkat pengembalian sebesar 87,96% atau sebanyak 95 buah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada beberapa kelurahan di Kota Binjai diperoleh deskripsi data yang tertera pada tabel berikut:

### 1. Karakteristik Responden

Pengujian deskriptif yang dilakukan peneliti terhadap identitas responden yang terbagi dalam empat karakteristik penilaian yaitu: Usia, Jenis kelamin Pendidikan Terakhir, Masa Kerja dan Masa Jabatan diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

#### **Karakteristik Responden**

Usia	Frequency	Percent
21 s/d 30 Tahun	45	47,37
31 s/d 40 Tahun	32	33,68
41 s/d 50 Tahun	18	18,95
Total	95	100
Jenis Kelamin	Frequency	Percent
Laki-laki	54	56,84
Perempuan	41	43,16
Total	95	100
Pendidikan Terakhir	Frequency	Percent
Sarjana	67	70,53
Magister	28	29,47
Total	95	100
Masa Kerja	Frequency	Percent
Kurang Dari 6 Tahun	15	15,79
6 s/d 10 Tahun	59	62,11
11 s/d 15 Tahun	19	20,00
16 s/d 20 Tahun	2	2,11
Total	95	100
Masa Jabatan	Frequency	Percent
Kurang Dari Satu Tahun	21	22,11
1 Tahun S/D 2 Tahun	48	50,53
3 Tahun S/D 5 Tahun	26	27,37
Total	95	100

Dari tabel 4.1 diatas dapat diketahui usia rata-rata responden pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Binjai. Responden dengan rentang usia 21 tahun sampai dengan 30 tahun berjumlah 45 orang, dengan tingkat presentase sebesar 47,37%. Selanjutnya responden dengan rentang usia 31 sampai dengan 40 tahun sebanyak 32 orang dengan tingkat persentase 33,68% dan responden dengan usia 41 sampai dengan 50 tahun berjumlah 18 orang dengan tingkat persentase 18,95%. Hal ini menunjukkan rata-rata responden pada penelitian ini berusia 21-30 tahun.

Kemudian jumlah responden laki-laki lebih banyak yaitu 54 orang dibandingkan dengan responden perempuan dengan jumlah 41 orang dengan tingkat persentase 56,48% dan 43,16% pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Binjai.

Berdasarkan rentang masa kerja responden pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Binjai. Responden dengan rentang masa kerja kurang dari 6 (enam) tahun berjumlah 15 orang dengan tingkat persentase 15,79%, kemudian responden dengan rentang masa kerja 6 (enam) sampai dengan 10 tahun berjumlah 59 orang dengan tingkat persentase 62,11%, dan responden dengan rentang masa kerja 11 sampai dengan 15 tahun berjumlah 19 orang dengan tingkat persentase 20 %. Selain itu terdapat juga responden dengan rentang masa kerja 16 sampai dengan 20 tahun berjumlah 2 orang dengan tingkat persentase 2,11%. Tidak terdapat responden pada penelitian ini dengan rentang masa kerja lebih dari 20 tahun.

Berdasarkan rentang masa jabatan dari responden pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Binjai. Responden dengan masa jabatan kurang dari satu tahun berjumlah 21 orang dengan tingkat persentase 21,11%, kemudian responden dengan masa jabatan satu sampai dengan dua tahun berjumlah 48 orang dengan tingkat persentase 50,53%, dan responden dengan masa jabatan 3 sampai dengan 5 tahun berjumlah 26 orang dengan persentase sebesar 27,37%. Tidak terdapat responden dengan tingkat masa jabatan melebihi lima tahun.

## 2. Deskriptif Kriteria Jawaban Responden

Deskripsi hasil penelitian merupakan tanggapan responden yang mengisi kuesioner mengenai pada Pemerintah Daerah Kota Binjai. Akan dilihat mengenai kecenderungan jawaban responden atas masing-masing variabel penelitian. Kecenderungan jawaban responden ini dapat dilihat dari bentuk statistik deskriptif dari masing-masing variabel.

Analisis deskriptif tersebut dijabarkanke dalam Rentang Skala sebagai berikut:

$$RS = \frac{m-n}{b} \text{ (Sugiyono, 2012).}$$

keterangan :

rs = rentang skala

m = jumlah skor tertinggi pada skala

n= jumlah skor terendah pada skala

b= jumlah kelas atau kategori yang dibuat

Perhitungan tersebut adalah:  $RS = \frac{5-1}{5} = 0,80$

Dengan demikian kategori skala dapat ditentukan sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Skala**

Interval Kuisioner	Kategori
1,00 - 1,80	Sangat Tidak Baik/Sangat rendah
1,81 - 2,60	Tidak Baik/Rendah
2,61 - 3,40	Cukup Baik/Sedang
3,41 - 4,20	Baik/Tinggi
4,21 - 5,00	Sangat Baik/Sangat Tinggi

(Sugiyono, 2012).

1. Teknologi Informasi

Hasil pengujian deskriptif yang dilakukan pada variable Teknologi Informasi

diperoleh hasil deskriptif data sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Analisis Deskriptif Variabel Teknologi Informasi**

Indikator	No	Pernyataan	Tanggapan					Total F	Total Skor	Rata-rata Skor	Kategori	
				TM	KM	CM	M					SM
Kemanfaatan	1	Teknologi informasi memudahkan pelaksanaan kegiatan pelaporan keuangan pemerintah	F	12	14	20	30	19	95	315	3,32	Cukup Baik
			%	12,63	14,74	21,05	31,58	20,00				
			Skor	12	28	60	120	95				
	2	Teknologi informasi dapat digunakan sebagai alat pendukung untuk pengambilan keputusan	F	13	13	19	32	18	95	314	3,31	Cukup Baik
			%	13,68	13,68	20,00	33,68	18,95				
			Skor	13	26	57	128	90				

Lanjutan Tabel 4.3

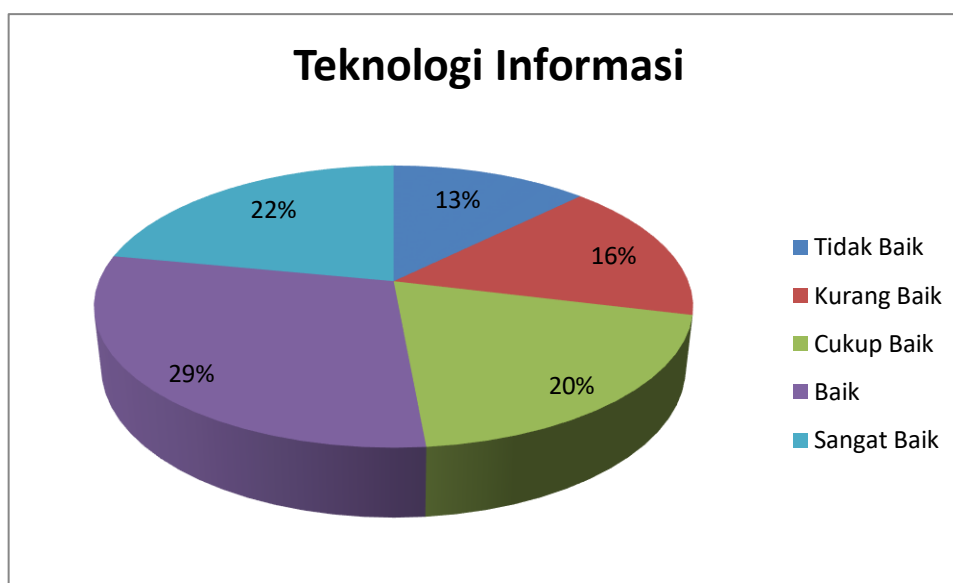
## Analisis Deskriptif Variabel Teknologi Informasi

Indikator	No	Pernyataan	Tanggapan					Total F	Total Skor	Rata-rata Skor	Kategori
				TM	KM	CM	M				
Efektifitas	3	Teknologi informasi mampu memberikan informasi secara efektif dan efisien	F	14	11	22	31	17	95	3,27	Cukup Baik
			%	14,74	11,58	23,16	32,63	17,89			
			Skor	14	22	66	124	85			
	4	Teknologi informasi yang digunakan mampu memberikan pengembangan kinerja	F	13	15	19	29	19	95	3,27	Cukup Baik
			%	13,68	15,79	20,00	30,53	20,00			
			Skor	13	30	57	116	95			
Jaringan Komunikasi	5	Teknologi informasi yang digunakan telah menggunakan jaringan komunikasi yang memadai	F	10	20	18	25	22	95	3,31	Cukup Baik
			%	10,53	21,05	18,95	26,32	23,16			
			Skor	10	40	54	100	110			
	6	Teknologi informasi memberikan akses informasi yang memadai	F	14	16	16	25	24	95	3,31	Cukup Baik
			%	14,74	16,84	16,84	26,32	25,26			
			Skor	14	32	48	100	120			
Personalia Teknologi Informasi	7	Pengaplikasian Teknologi informasi mempergunakan Sumber Daya Yang Memadai	F	10	18	19	22	26	95	3,38	Cukup Baik
			%	10,53	18,95	20,00	23,16	27,37			
			Skor	10	36	57	88	130			
	8	pemberian pendidikan dan pelatihan kepada SDM dalam pengaplikasian teknologi informasi	F	10	16	17	30	22	95	3,40	Cukup Baik
			%	10,53	16,84	17,89	31,58	23,16			
			Skor	10	32	51	120	110			
TOTAL									26,56	Cukup Baik	
RATA-RATA									3,32	Cukup Baik	

Berdasarkan data pada tabel 4.3 diketahui rata-rata karakteristik jawaban maupun tanggapan dari responden terhadap variabel Teknologi Informasi yang diukur dengan menggunakan beberapa indikator pengukuran.

Tanggapan responden terhadap variabel sistem informasi akuntansi yang diukur dengan lima indikator pengukuran (kemanfaatan, Efektifitas, Jaringan, Komunikasi, dan Personalia) yang terbagi dalam delapan item pernyataan dengan perolehan total rata-rata penilaian sebesar 3,32 yang termasuk dalam kategori cukup baik.

Hasil pengujian deskriptif pada variable system informasi akuntansi juga di tampilkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



**Gambar 4.1: Diagram Deskriptif Teknologi Informasi**

## 2. Sistem Pengendalian Intern

Hasil pengujian deskriptif yang dilakukan pada variabel sistem pengendalian intern diperoleh hasil deskriptif data sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

### **Analisis Deskriptif Variabel Sistem pengendalian Intern**

Indikator	No	Pernyataan	Tanggapan					Total F	Total Skor	Rata-rata Skor	Kategori	
			F	TM	KM	CM	M					SM
Lingkungan Pengendalian	1	Pemerintah telah memiliki kode etik yang komprehensif	F	13	13	13	30	26	95	328	3,45	Baik
			%	13,68	13,68	13,68	31,58	27,37				
			Skor	13	26	39	120	130				
	2	Pemerintah memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas mengenai suatu pekerjaan tertentu	F	11	15	15	28	26	95	328	3,45	Baik
			%	11,58	15,79	15,79	29,47	27,37				
			Skor	11	30	45	112	130				
Penilaian Resiko	3	Identifikasi risiko sudah ditetapkan dalam bentuk dokumen	F	14	12	14	31	24	95	324	3,41	Baik
			%	14,74	12,63	14,74	32,63	25,26				
			Skor	14	24	42	124	120				
	4	Kinerja ditetapkan berbasis manajemen risiko	F	12	14	15	32	15	88	288	3,27	Baik
			%	13,64	15,91	17,05	36,36	17,05				
			Skor	12	28	45	128	75				
Kegiatan Pengendalian	5	Ada mekanisme untuk mereview kinerja	F	14	12	12	32	25	95	327	3,44	Baik
			%	14,74	12,63	12,63	33,68	26,32				
			Skor	14	24	36	128	125				
	6	Pencatatan dan dokumentasi dilakukan secara lengkap dan akurat dan memungkinkan dilakukannya penelusuran	F	19	7	11	27	31	95	329	3,46	Baik
			%	20,00	7,37	11,58	28,42	32,63				
			Skor	19	14	33	108	155				



Lanjutan Tabel 4.4

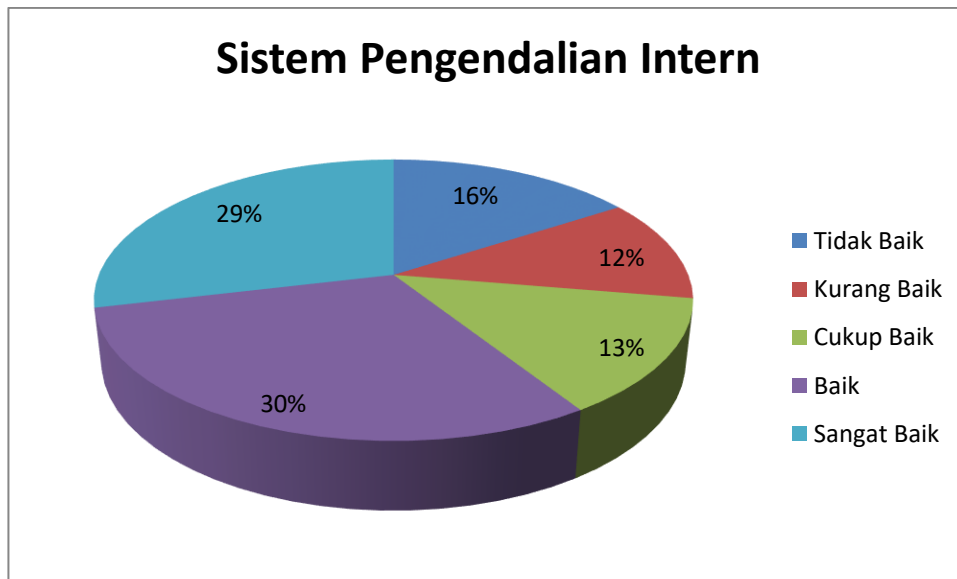
## Analisis Deskriptif Variabel Sistem pengendalian Intern

Indikator	No	Pernyataan	Tanggapan					Total F	Total Skor	Rata-rata Skor	Kategori
				TM	KM	CM	M				
Pemantauan	7	Terdapat bukti telah dilakukannya fungsi pengendalian seperti review anggaran tindak lanjut hasil pemeriksaan	F	18	8	9	24	35	94	3,53	Baik
			%	19,15	8,51	9,57	25,53	37,23			
			Skor	18	16	27	96	175			
	8	Adanya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dilakukan	F	18	8	11	24	34	95	3,51	Baik
			%	18,95	8,42	11,58	25,26	35,79			
			Skor	18	16	33	96	170			
TOTAL									27,53	Baik	
RATA-RATA									3,44		

Berdasarkan data pada tabel 4.4 diketahui rata-rata karakteristik jawaban maupun tanggapan dari responden terhadap variabel Sistem Pengendalian Intern yang di ukur dengan menggunakan beberapa indikator pengukuran.

Tanggapan responden terhadap variabel sistem informasi akuntansi yang di ukur dengan lima indikator pengukuran yang terbagi dalam delapan item pernyataan dengan perolehan total rata-rata penilaian sebesar 3,44 yang termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang diterapkan pada OPD Pemerintah Kota Binjai telah dilakukan dengan baik.

Hasil pengujian deskriptif pada variabel sistem pengendalian intern juga di tampilkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



**Gambar 4.2: Deskriptif Sistem Pengendalian Intern**

### 3. Transparansi Laporan Keuangan

Hasil pengujian deskriptif yang dilakukan pada variabel transparansi Laporan

Keuangan diperoleh hasil deskriptif data sebagai berikut:

**Tabel 4.5**

#### Analisis Deskriptif Variabel Transparansi Laporan Keuangan

Indikator	No	Pernyataan	Tanggapan					Total F	Total Skor	Rata-rata Skor	Kategori
			F	TM	KM	CM	M				
Publikasi kebijakan	1	Setiap kebijakan pemerintah telah dipublikasikan untuk umum	F	5	10	5	35	40	95	4,00	Baik
			%	5,26	10,53	5,26	36,84	42,11			
			Skor	5	20	15	140	200			
									380		
	2	Masyarakat umum dapat memperoleh kebijakan-kebijakan yang di lakukan pemerintah	F	6	8	6	35	40	95	4,00	Baik
			%	6,32	8,42	6,32	36,84	42,11			
Skor			6	16	18	140	200				
								380			

Lanjutan Tabel 4.5

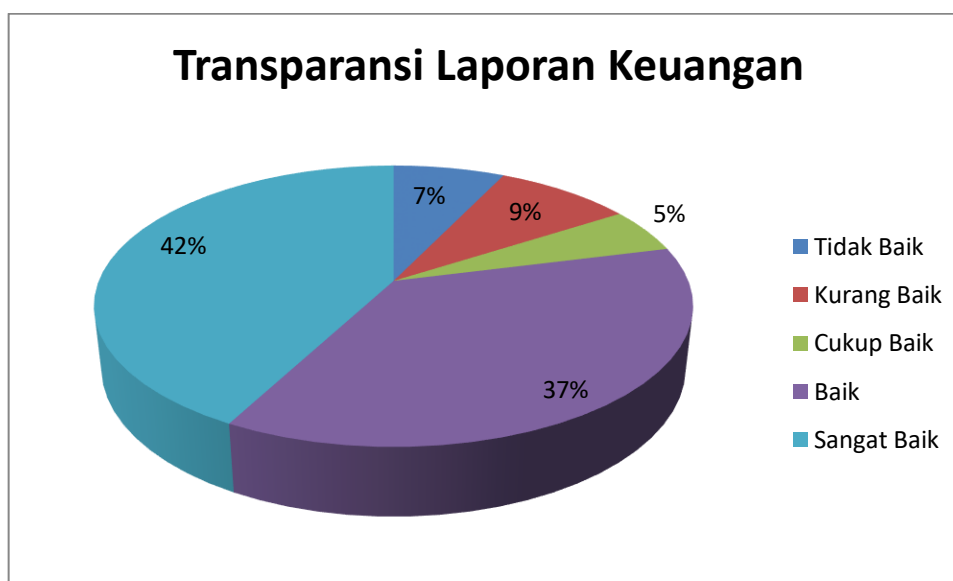
## Analisis Deskriptif Variabel Transparansi Laporan Keuangan

Indikator	No	Pernyataan	Tanggapan					Total F	Total Skor	Rata-rata Skor	Kategori	
				TM	KM	CM	M					SM
Penyajian Informasi	3	Penyajian informasi keuangan daerah dilakukan secara efektif dan efisien	F	7	9	4	38	37	95		3,94	Baik
			%	7,37	9,47	4,21	40,00	38,95				
			Skor	7	18	12	152	185				
									374			
	4	Penyediaan informasi keuangan dilakukan dengan pertanggung jawaban	F	9	7	4	33	42	95		3,97	Baik
			%	9,47	7,37	4,21	34,74	44,21				
Skor			9	14	12	132	210					
								377				
Penanganan Keluhan	5	Masyarakat dapat memberikan kritik dan saran atas kebijakan pemerintah	F	7	8	5	30	45	95		4,03	Baik
			%	7,37	8,42	5,26	31,58	47,37				
			Skor	7	16	15	120	225				
									383			
	6	Penanganan keluhan baik saran dan kritik dilakukan dengan baik dan tepat	F	8	7	5	31	44	95		4,01	Baik
			%	8,42	7,37	5,26	32,63	46,32				
Skor			8	14	15	124	220					
								381				
Adanya Kerjasama Dengan Media Massa dan lembaga Non Pemerintah	7	Laporan keuangan dipublikasikan di media massa dan lokal	F	7	8	5	38	37	95		3,95	Baik
			%	7,37	8,42	5,26	40,00	38,95				
			Skor	7	16	15	152	185				
									375			
	8	Adanya keterlibatan media massa dalam penyajian laporan keuangan	F	7	8	5	39	36	95		3,94	Baik
			%	7,37	8,42	5,26	41,05	37,89				
Skor			7	16	15	156	180					
								374				
TOTAL										31,83	Baik	
RATA-RATA										3,98		

Berdasarkan data pada tabel 4.5 diketahui rata-rata karakteristik jawaban maupun tanggapan dari responden terhadap variabel Transparansi Laporan Keuangan yang di ukur dengan menggunakan beberapa indikator pengukuran.

Tanggapan responden terhadap variabel Transparansi Laporan Keuangan yang di ukur dengan lima indikator pengukuran yang terbagi dalam delapan item pernyataan dengan perolehan total rata-rata penilaian sebesar 3,98 yang termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pelaporan keuangan yang transparan di wilayah pemerintahan kota Binjai telah terlaksana dengan baik. Namun belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal.

Hasil pengujian deskriptif pada variabel transparansi laporan keuangan juga di tampilkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



**Gambar 4.3** Deskripif Transparansi Laporan Keuangan

## 4. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Hasil pengujian deskriptif yang dilakukan pada variabel Akuntabilitas Kinerja

Kuangan diperoleh hasil deskriptif data sebagai berikut:

Tabel 4.6

## Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Indikator	No	Pernyataan	Tanggapan					Total F	Total Skor	Rata-rata Skor	Kategori	
			F	TS	KS	CS	S					SS
Sistem Pengawasan	1	Pelaksanaan Kinerja dilakukan dengan adanya pengawasan yang memadai	F	6	10	14	36	29	95	357	3,76	Baik
			%	6,32	10,53	14,74	37,89	30,53				
			Skor	6	20	42	144	145				
	2	Dengan adanya sistem pengawasan dapat meminimalisir terjadinya kesalaham	F	7	9	15	37	27	95	353	3,72	Baik
			%	7,37	9,47	15,79	38,95	28,42				
			Skor	7	18	45	148	135				
Akses Public	3	Ketersediaan akses bagi pemangku kepentingan untuk meriview kinerja	F	10	9	13	37	26	95	345	3,63	Baik
			%	10,53	9,47	13,68	38,95	27,37				
			Skor	10	18	39	148	130				
	4	Akses publik dapat di pergunakan sebagai alat untuk monitiring dan evaluasi	F	6	14	11	34	30	95	353	3,72	Baik
			%	6,32	14,74	11,58	35,79	31,58				
			Skor	6	28	33	136	150				

Lanjutan Tabel 4.6

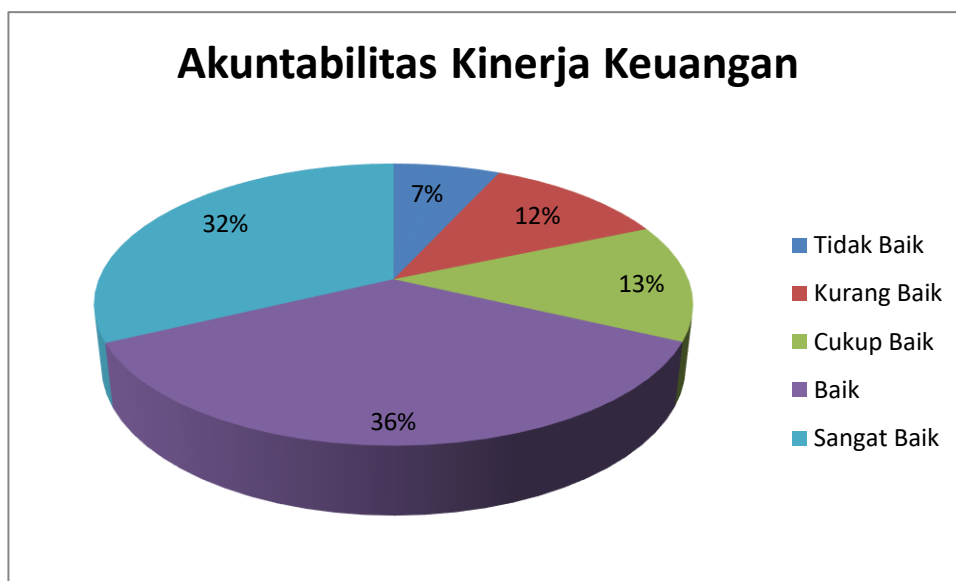
## Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Indikator	No	Pernyataan	Tanggapan					Total F	Total Skor	Rata-rata Skor	Kategori	
				TS	KS	CS	S					SS
Keterbukaan	5	Kegiatan pemerintahan dilakukan secara jujur dan terbuka	F	5	13	1329	35		1382		3,01	Baik
			%	0,36	0,94	96,16	2,53	0,00				
			Skor	5	26	3987	140	0		4158		
	6	Tidak ada informasi yang disembunyikan oleh pemerintah	F	6	12	13	33	31	95		3,75	Baik
			%	6,32	12,63	13,68	34,74	32,63				
			Skor	6	24	39	132	155		356		
Pemamfaatan Sumber Daya	7	Pelaksanaan kinerja menggunakan sumber daya yang memadai	F	6	11	11	34	33	95		3,81	Baik
			%	6,32	11,58	11,58	35,79	34,74				
			Skor	6	22	33	136	165		362		
	8	Adanya review atas penggunaan sumber daya secara periodic	F	6	11	12	33	33	95		3,80	Baik
			%	6,32	11,58	12,63	34,74	34,74				
			Skor	6	22	36	132	165		361		
TOTAL									29,19	Baik		
RATA-RATA									3,65			

Berdasarkan data pada tabel 4.6 diketahui rata-rata karakteristik jawaban maupun tanggapan dari responden terhadap variabel akuntabilitas kinerja keuangan yang di ukur dengan menggunakan beberapa indikator pengukuran.

Tanggapan responden terhadap variable akuntabilitas kinerja kuangan yang di ukur dengan lima indikator pengukuran yang terbagi dalam delapan item pernyataan dengan perolehan total rata-rata penilaian sebesar 3,65 yang termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja keuangan pemerintahan kota Binjai telah terlaksana dengan baik.

Hasil pengujian deskriptif pada variable transparansi laporan keuangan juga di tampilkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



**Gambar 4.4 Akuntabilitas Kinerja Keuangan**

### 4.1.3. Teknik Analisis Data

#### 1. Analisis Pengukuran Outer Model

Analisis model pengukuran (*Outer Model*) bertujuan untuk mengevaluasi variabel konstruk yang diteliti, validitas (ketepatan), dan reliabilitas (kehandalan) dari suatu variabel.

##### a. *Construct Validity and Reliability*

*Construct Validity and Reliability* adalah pengujian untuk mengukur kehandalan suatu konstruk. Kehandalan skor konstruk harus cukup tinggi. Kriteria reliability dan validity dapat dilihat dari *Cronbach Alpha* > 0,7, *Rho\_A* > 0.7, *Composite Reliability* > 0,6, *Average Variance Extracted (AVE)* > 0,5 (Fornell & Larcker dalam Juliandi 2018).

Tabel 4.7

*Construct Validity and Reliability*

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
Teknologi Informasi (X1)	0,980	0,981	0,983	0,878
Sistem Pengendalian Intern (X2)	0,985	0,985	0,987	0,905
Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y)	0,978	0,978	0,981	0,865
Transparansi Laporan Keuangan (Z)	0,976	0,977	0,980	0,858

Berdasarkan data *Construct Validity and Reliability* pada tabel 4.7 diperoleh hasil bahwa seluruh variabel Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Transparansi Laporan Keuangan, dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan memiliki nilai (*Cronbach Alpha dan Rho\_A* > 0.7), nilai (*Composite Reliability* > 0,6) dan nilai (*Average Variance Extracted / AVE* > 0,5). Dengan demikian *Validity and Reliability* dari seluruh variabel adalah baik.

b. Diskriminant Validity (Validitas Diskriminan)

Untuk menentukan validitas diskriminan dari konstruk penelitian dalam *website* SmartPLS yang dikemukakan oleh (Jorg Henseler Christian, M. Ringle, & Marko Sarsted dalam Juliandi, 2018) menyatakan bahwa untuk melihat nilai validitas diskriminan terbaru dapat dilihat dengan membandingkan nilai *Heretroit-Monotrait Ratio* (HTMT). Apabila nilai *Heretroit-Monotrait Ratio* (HTMT) < 0.90 maka konstruk dapat dikatakan valid.



Tabel 4.3

*Heretroit-Monotrait Ratio (HTMT)*

	Teknologi Informasi (X1)	Sistem Pengendalian Intern (X2)	Transparansi Laporan Keuangan (z)	Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y)
Teknologi Informasi (X1)				
Sistem Pengendalian Intern (X2)	0.293			
Transparansi Laporan Keuangan (z)	0.606	0.494		
Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y)	0.674	0.633	0.844	

Berdasarkan perolehan nilai *Heretroit-Monotrait Ratio* (HTMT) pada tabel 4.3 diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa seluruh nilai (HTMT) variabel penelitian lebih kecil dari 0.90. dengan demikian konstruk penelitian yang digunakan adalah valid.

Selain itu, untuk menentukan *Diskriminant Validity* (validitas diskriminan) adalah sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik). Untuk mengukur validitas diskriminan dapat dilihat dari perolehan nilai, *Fornell-LarckerCirteiron*, *Cross Loadings/loading Factor* dimana nilai outer loading dari konstruk penelitian  $\geq 0.7$  maka konstruk adalah valid. Namun untuk penelitian dengan jumlah sampel adalah kecil maka nilai outer loading  $>$  dari 0,4 dapat di gunakan (Juliandi, 2018).

**Tabel 4.4**  
**Outer Loading**

	Teknologi Informasi (X1)	Sistem Pengendalian Intern (X2)	Transparansi Laporan Keuangan (z)	Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y)
x1.1	0.937			
x1.2	0.938			
x1.3	0.930			
x1.4	0.943			
x1.5	0.925			
x1.6	0.944			
x1.7	0.936			
x1.8	0.943			
x2.1		0.943		
x2.2		0.948		
x2.3		0.940		
x2.4		0.945		
x2.5		0.943		
x2.6		0.965		
X2.7		0.963		
X2.8		0.963		
z1			0.928	
z2			0.931	
z3			0.928	
z4			0.931	
z5			0.926	
z6			0.928	
z7			0.920	
z8			0.920	
Y1				0.926
Y2				0.926
Y3				0.942
Y4				0.923
Y5				0.926
Y6				0.927
Y7				0.939
Y8				0.931

Dari hasil tabel 4.4 diperoleh hasil yang menunjukkan nilai outer loading dari konstruk variable penelitian  $> 0,7$ . Dengan demikian variable konstruk yang digunakan pada penelitian ini memiliki validitas diskriminan yang baik.

## 2. Analisis Penukuran *Inner Model*

Analisis model structural atau (*inner model*) bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian. Bagian yang perlu dianalisis dalam model struktural yakni, koefisien determinasi (R-Square) dan pengujian hipotesis.

### a. R-Square

Koefisien determinasi (*R-Square*) bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan prediksi suatu model. Dengan kata lain untuk mengevaluasi bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas pada sebuah model jalur. Jika nilai  $R^2 = 0,75$  maka model adalah substansial (kuat), jika  $R^2 = 0.50$  maka model adalah moderate (sedang), jika  $R^2 = 0,25$  maka model adalah lemah (Juliandi, 2018).

**Tabel 4.5**

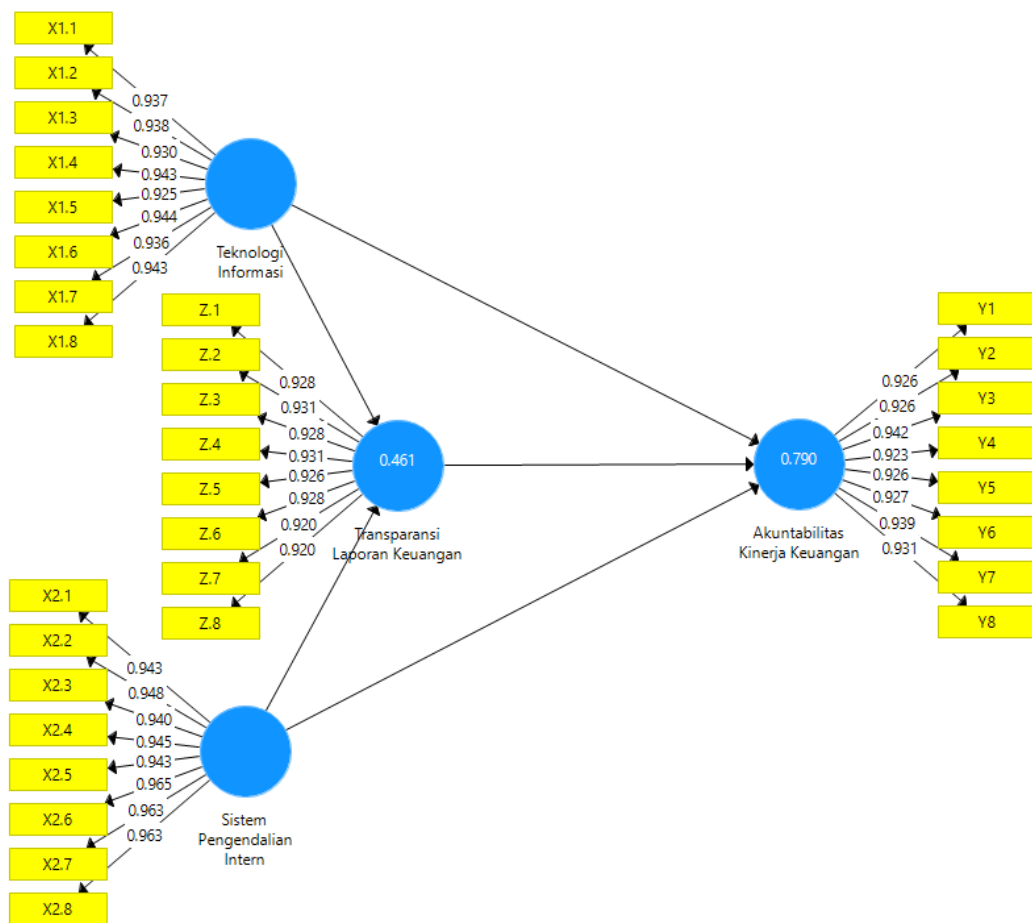
### R-Square

	R-Square	R-Square Adjusted
Transparansi Laporan Keuangan (Z)	0.461	0.449
Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y)	0.790	0.783

Sumber : Diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh hasil R-Square sebesar 0,461 dari variabel Transparansi Keuangan (Z). Hal ini mengindikasikan keakuratan variabel Teknologi Informasi (X1), dan Sitem Pengendalian Intern (X2), dalam menjelaskan variable Transparansi Laporan Keuangan (Z) adalah sebesar 46,1, %.

Kemudian diperoleh R-square sebesar 0,790 pada variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y). Hal ini mengindikasikan keakuratan variabel Teknologi Informasi (X1), Sitem Pengendalian Intern (X2) dan Transparansi Keuangan (Z) dalam menjelaskan variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) adalah sebesar 79.%. Kemampuan variabel Teknologi Informasi (X1), Sitem Pengendalian Intern (X2) dan Transparansi Keuangan (Z) dalam menjelaskan variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) juga dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 4.5 R-Square**

*b.* F-Square

F-Square adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Perubahan nilai F-Square saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan memiliki dampak yang substantif pada konstruk endogen. Kriterianya jika  $f^2 = 0.02$  mengindikasikan efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap variabel endogen, jika  $f^2 = 0,15$  mengindikasikan efek yang sedang dari variabel eksogen terhadap variabel endogen, jika  $f^2 = 0,35$  mengindikasikan efek yang besar dari variabel eksogen terhadap variabel endogen (Cohen dalam Juliandi 2018).

**Tabel 4.6**

**F-Square**

	Teknologi Informasi (X1)	Sistem Pengendalian Intern (X2)	Transparansi Laporan Keuangan (z)	Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y)
Teknologi Informasi (X1)			0.418	0.213
Sistem Pengendalian Intern (X2)			0.197	0.304
Transparansi Laporan Keuangan (z)				0.718
Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y)				

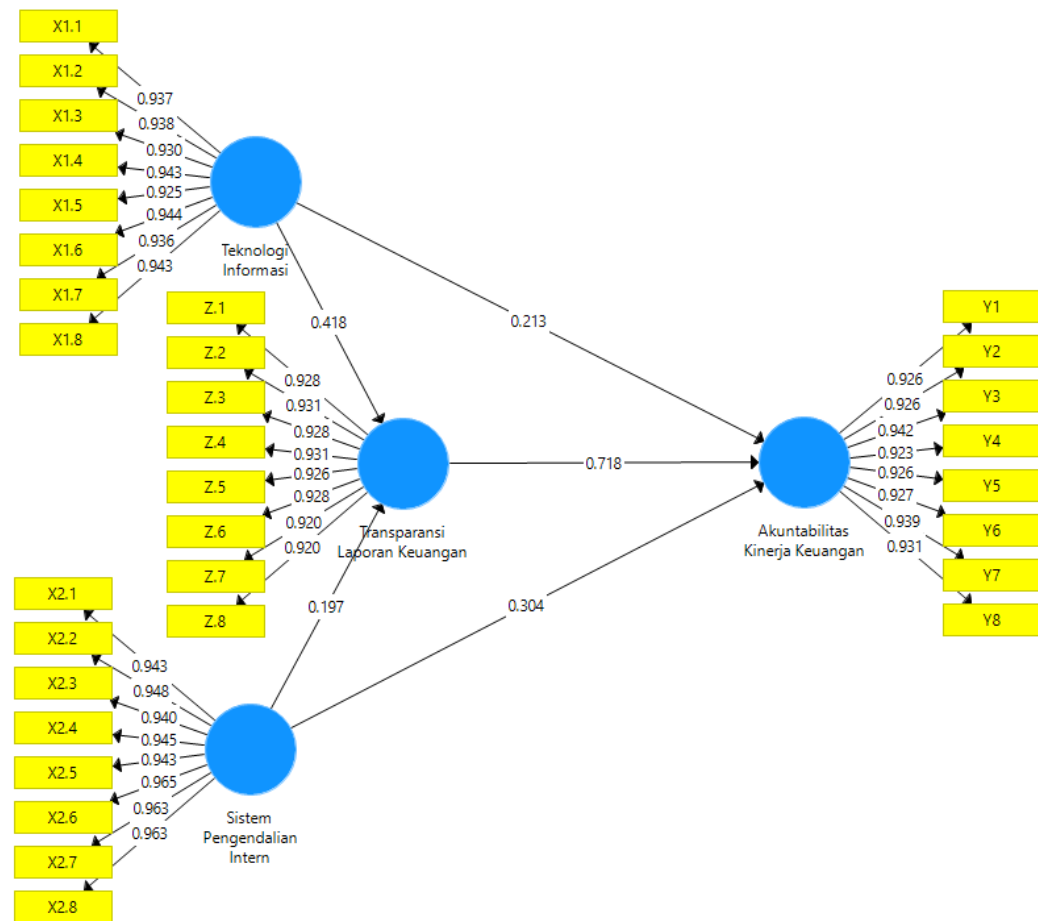
Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat pengaruh f-square variabel eksogen Teknologi Informasi (X1) terhadap Transparansi Laporan Keuangan (Z) adalah sebesar 0,418. Hal ini mengartikan akan terjadi perubahan pada nilai pada variabel Transparansi Laporan Keuangan (Z) sebesar 41,8% apabila variabel Teknologi Informasi (X1) dihilangkan dari konstruk. kemampuan dari variabel Teknologi Informasi (X1) dalam menjelaskan variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) adalah sebesar 21.3%. Hal ini mengartikan akan terjadi perubahan pada nilai pada variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) sebesar 21,3% apabila variabel Teknologi Informasi (X1) dihilangkan dari konstruk.

Kemudian juga diperoleh pengaruh f-square variabel eksogen Sistem Pengendalian Intern (X2) terhadap Trnparansi laporan Keuangan (Z) adalah sebesar 0,197. Hal ini mengartikan akan terjadi perubahan pada nilai pada variabel Trasparansi Laporan Keuangan (Z) sebesar 19,7% apabila variael Sistem Pengendalian Intern (X2) dihilangkan dari konstruk. Selanjudnya kemampuan dari variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) dalam menjelaskan variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) adalah sebesar 0,304. Hal ini mengartikan akan terjadi perubahan pada nilai pada variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) sebesar 30,4% apabila variael Sistem Pengendalian Inten (X2) dihilangkan dari konstruk.

Perolehan nilai F square dari variabel Transparansi Laporan Keuangan (Z) terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) adalah Sebesar 0,718 yang menjelaskan akan terjadi perubahan nilai pada variable Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) sebesar 71,8% apabila variable Transparansi Laporan Keuangan (Z) di hilangkan dari konstruk penelitian.

Perolehan nilai F-Square dalam penelitian ini juga dapat dilihat pada gambar

4.2 Berikut:



Gambar 4.6 F-Square

### 3. Analisis Pengukuran Hipotesis

#### a. Hipotesis Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Analisis *direct effect* berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Kriteria pengukuran pengaruh langsung dapat menggunakan nilai dari koefisien jalur (*Path Coefficient*).

Jika nilai koefisien jalur adalah positif maka nilai dari suatu variabel terhadap variabel lainnya adalah searah sehingga jika nilai suatu variabel eksogen meningkat, maka nilai dari variabel endogen akan meningkat. Jika nilai koefisien jalur adalah negatif maka pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya adalah berlawanan arah, sehingga jika nilai variabel eksogen meningkat maka nilai variabel endogen akan menurun. (Juliandi, 2018).

**Tabel 4.7**

**Pengaruh Langsung**

	<i>Ordinal Sampel</i>	<i>Sampel Mean</i>	<i>Standart Deviasi</i>	<i>T-Statistik</i>	<i>P Values</i>
X1 → Y	0.263	0.264	0.062	4.220	0.000
X1 → Z	0.496	0.498	0.064	7.694	0.000
X2 → Y	0.289	0.288	0.074	3.883	0.000
X2 → Z	0.341	0.335	0.080	4.275	0.000
Z → Y	0.528	0.525	0.077	6.890	0.000

Berdasarkan tabel 4.7 diatas diperoleh hasil pengujian pengaruh langsung Teknologi Informasi (X1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) mempunyai koefisien jalur (*Ordinal Sampel*) sebesar 0.264 (positif), maka peningkatan nilai variable Teknologi Informasi (X1) akan diikuti oleh peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) sebesar 26,4%. Pengaruh variable Teknologi Informasi (X1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) mempunyai nilai *P-Values* (0.000) <  $\alpha$  (0.05), sehingga variable Teknologi Informasi (X1) dapat mempengaruhi variable Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y)

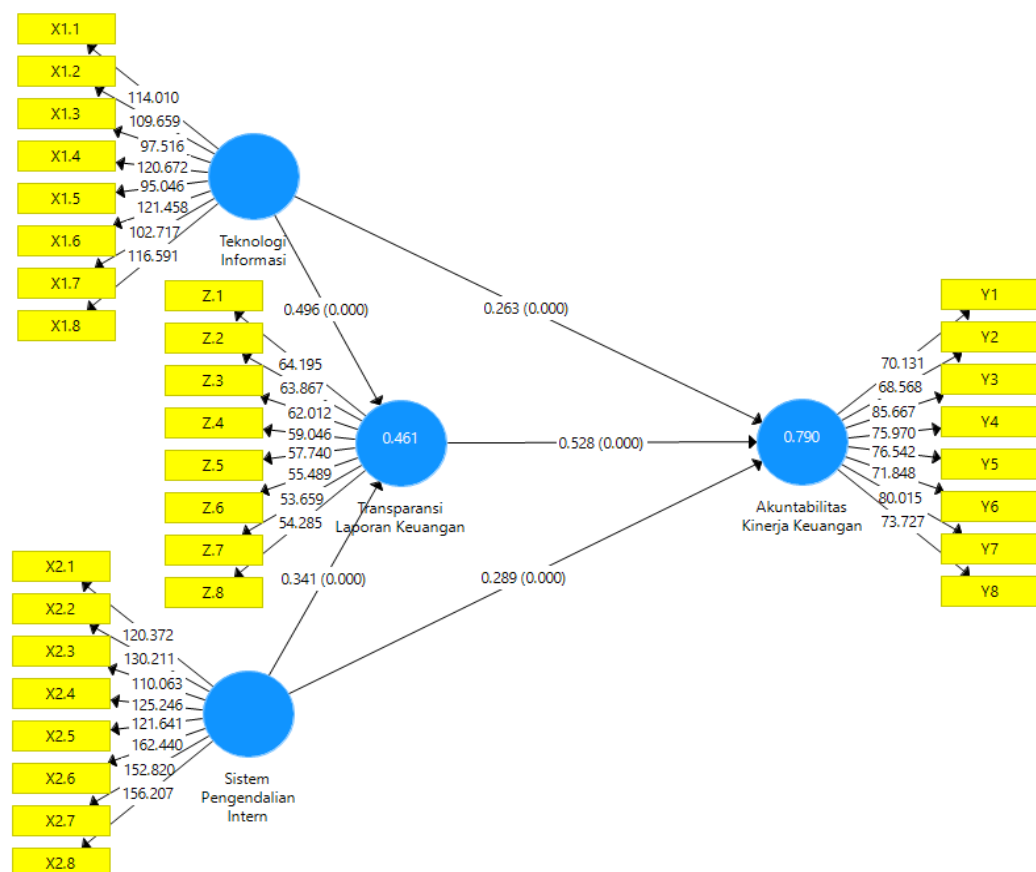


Kemudian pengaruh variable Teknologi Informasi (X1) terhadap variable mediasi Transparansi Laporan Keuangan (Z) diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,496 (Positif). Maka peningkatan nilai yang terjadi pada variable Teknologi Informasi (X1) akan di ikuti dengan peningkatan Nilai pada Variabel Transparansi Laporan Keuangan (Z) sebesar 26,4%. Pengaruh variable Teknologi Informasi (X1) terhadap Variabel Transparansi Laporan Keuangan (Z) memiliki nilai P-Values (0.000) <  $\alpha$ , Sehingga variable Teknologi Informasi (X1) mampu mempengaruhi variable Transparansi Laporan Keuangan (Z).

Hasil pengujian pengaruh langsung Sistem Pengendalian Intern (X2) terhadap Akuntanilitas Kinerja Keuangan (Y) mempunyai koefisien jalur (*Ordinal Sampel*) sebesar 0.289 (positif), maka peningkatan nilai variable Sistem Pengendalian Intern (X2) akan diikuti oleh peningkatan nilai Akuntanilitas Kinerja Keuangan (Y) sebesar 28,9%. Pengaruh variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) terhadap Akuntanilitas Kinerja Keuangan (Y) mempunyai nilai *P-Values* (0.000) <  $\alpha$  (0.05), sehingga variable Sistem Pengendalian Intern (X2) dapat mempengaruhi variable Akuntanilitas Kinerja Keuangan (Y).

Pengaruh variable Sistem Pengendalian Intern (X2) terhadap variable mediasi Transparansi Laporan Keuangan (Z) diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,341 (Positif). Maka peningkatan nilai yang terjadi pada variable Sistem Pengendalian Intern (X2) akan di ikuti dengan peningkatan Nilai pada Variabel Transparansi Laporan Keuangan (Z) sebesar 34,1%. Pengaruh variable Sistem Pengendalian Intern (X2) terhadap Variabel Transparansi Laporan Keuangan (Z) memiliki nilai P-Values (0.000) <  $\alpha$ , Sehingga variable Sistem Pengendalian Intern (X2) mampu mempengaruhi variable Transparansi Laporan Keuangan (Z).

Hasil pengujian pengaruh langsung menunjukkan perolehan nilai koefisien jalur (Ordinal sampel) dari variable Transparansi Laporan Keuangan (Z) terhadap variable Akuntanilitas Kinerja Keuangan (Y) adalah sebesar 0.528. Maka setiap adanya perubahan nilai pada variabel Transparansi Laporan Keuangan (Z) akan di ikuti oleh perubahan nilai pada variabel Akuntanilitas Kinerja Keuangan (Y) sebesar 52,8%. Pengaruh variabel Transparansi Laporan Keuangan (Z) terhadap Variabel Akuntanilitas Kinerja Keuangan (Y) memiliki nilai P-Values (0.000) <  $\alpha$ , Sehingga variabel Transparansi Laporan Keuangan (Z) mampu mempengaruhi variabel Akuntanilitas Kinerja Keuangan (Y). Pengaruh Langsung dari variabel Bebas terhadap variabel terikat juga dapat dilihat dari dambar 4.7 berikut:



**Gambar 4.7 Pengaruh Langsung**

b. Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung (*Inndirect Effect*)

Analisis indirect effect berguna untuk menguji hipotesis pengaruh tidak langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen) yang diantarai/dimediasi oleh suatu variabel intervening (variabel mediator). Jika nilai P-Values < 0,05, maka signifikan, artinya variabel memediasi, memediasi pengaruh suatu variabel eksogen terhadap suatu variabel endogen. Dengan kata lain, pengaruhnya adalah tidak langsung. Jika nilai P-Values > 0,05, maka tidak signifikan, artinya variabel mediasi tidak memediasi pengaruh suatu variabel eksogen terhadap suatu variabel endogen. Dengan kata lain, pengaruhnya adalah langsung.

**Tabel 4.8**  
**Pegaruh Tidak Langsung**

	<i>Ordinal Sampel</i>	<i>Sampel Mean</i>	<i>Standart Deviasi</i>	<i>T-Statistik</i>	<i>P Values</i>
X1 → Z → Y	0.262	0.261	0.050	5.231	0.000
X2 → Z → Y	0.180	0.180	0.061	0.2930	0.003

Berdasarkan tabel 4.8 diatas diperoleh pengaruh tidak langsung Teknologi Informasi (X1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) yang dimediasi variabel Transparansi Laporan Keuangan (Z) mempunyai koefisien jalur (*Ordinal Sampel*) sebesar 0.262 (positif), maka variabel Transparansi Laporan Keuangan (Z) dapat memperantarai pengaruh variabel Teknologi Informasi (X1) terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) sebesar 26,2%.

Pengaruh variabel Teknologi Informasi (X1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) yang dimediasi variabel Transparansi Laporan Keuangan (Z) mempunyai nilai P-Values  $(0.000) < \alpha (0.05)$ , sehingga variabel Transparansi Laporan Keuangan (Z) dapat memediasi pengaruh variabel Teknologi Informasi (X1) terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y).

Pengaruh tidak langsung Sistem Pengendalian Intern (X2) terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) yang dimediasi variabel Transparansi Laporan Keuangan (Z) mempunyai koefisien jalur (*Ordinal Sampel*) sebesar 0.180 (positif), maka variabel Transparansi Laporan Keuangan (Z) dapat memperantarai pengaruh variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) sebesar 18,%. Pengaruh variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) yang dimediasi variabel Transparansi Laporan Keuangan (Z) mempunyai nilai P-values  $(0.003) < \alpha (0.05)$ , sehingga variabel Transparansi Laporan Keuangan (Z) dapat memediasi pengaruh variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y).

c. Pengaruh Total (*Total effect*)

*Total effect* merupakan total dari *Direct Effect* dengan *Indirect Effect*. (Juliandi, 2018). Pengaruh total (*Total Effect*) dari pengaruh langsung (*direct effect*) dengan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dapat dilihat dari nilai terbesar pengaruh variabel bebas (X) dan nilai terbesar dari P-value. Pengaruh total (*Total Effect*) akan dijlaskan pada tabel berikut:

**Tabel 4.9.****Pengaruh Total**

	<i>Ordinal Sampel</i>	<i>Sampel Mean</i>	<i>Standart Deviasi</i>	<i>T Statistik</i>	<i>P Values</i>
X1 → Y	0,525	0.525	0.076	6,933	0.000
X1 → Z	0,496	0.497	0.066	7,559	0.000
X2 → Y	0,469	0.469	0.074	6,370	0.000
X2 → Z	0,431	0.338	0.083	4,108	0.000
Z → Y	0,528	0.527	0.080	6,587	0.000

(Diolah Tahun 2022)

Pada tabel 4.9 telah dijelaskan pengaruh total atau total efek dari variabel Teknologi Informasi (X1) terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) adalah sebesar 0,525 dengan nilai P-value sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian, Variabel X1 memiliki pengaruh yang signifikan baik langsung maupun tidak langsung terhadap variabel Y.

Pada tabel 4.9 telah dijelaskan pengaruh total atau total efek dari variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) adalah sebesar 0,469 dengan nilai P-value sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian, Variabel X2 memiliki pengaruh yang signifikan baik langsung maupun tidak langsung terhadap variabel Y.

## **5.2. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Binjai yang terbagi dalam 36 Organisasi Perangkat Daerah, temuan peneliti menunjukkan hasil bahwa terdapat kesenjangan dalam membentuk dan menciptakan atas akuntabilitas kinerja keuangan.

Dalam pembentukan akuntabilitas kinerja yang baik dalam suatu lingkup organisasi harus memenuhi beberapa aspek pelaksanaannya. Aspek-aspek tersebut berupa sistem pengawasan, akses publik, keterbukaan dan pemanfaatan sumber daya. Hasil dari analisis data yang dilakukan atas akuntabilitas kinerja diperoleh hasil nilai *outer loading* terbesar dari variabel akuntabilitas kinerja sebesar 0,942 dari indikator akses publik kemudian nilai *Outer Loading* terkecil sebesar 0.923 dari indikator akses publik. Dengan demikian dalam pelaksanaan dan penerapan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah di wilayah Pemerintah Kota Binjai di dominasi oleh aspek penyediaan layanan publik (*Accessibilitas Public*).

Dari hasil pengujian deskriptif terhadap pencapaian akuntabilitas kinerja keuangan di pemerintahan Kota Binjai juga diperoleh hasil rata-rata deskriptif data sebesar 3,75. Berdasarkan skala pengukuran yang digunakan hal ini menunjukkan pencapaian akuntabilitas kinerja tersebut telah tercapai dengan baik namun belum optimal dimana masih terdapat gap sebesar 25% atas pelaksanaan yang belum tercapai atas akuntabilitas kinerja keuangan.

Kesenjangan atau gap yang terjadi pada pelaksanaan akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah terjadi pada indikator atau aspek aksesibilitas publik dimana diperoleh tingkat ketercapaian dengan skor 3,65 atau sebesar 73%. Dengan demikian dapat diketahui pemenuhan aksesibilitas publik untuk memperoleh informasi pemerintah masih belum optimal. Kemudian pada indikator keterbukaan diperoleh hasil deskriptif berdasarkan skala sebesar 3,75 atau dengan tingkat ketercapaian sebesar 75%. Hal ini mengindikasikan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi masih belum optimal.

#### **4.2.1. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Transparansi Laporan Keuangan**

Pada penelitian ini telah dilakukan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Teknologi Informasi terhadap Transparansi Laporan Keuangan. Hasil pengujian hipotesis tersebut menunjukkan hasil perolehan nilai koefisien jalur sebesar 0.263. Perolehan nilai tersebut menjelaskan bahwa apabila terjadi perubahan nilai pada Teknologi informasi akan diikuti perubahan nilai yang searah pada Transparansi Laporan Keuangan.

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan juga menunjukkan hasil perolehan *P-Value* sebesar  $(0,000) < \alpha (0.05)$ . Dengan demikian hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Teknologi Informasi berpengaruh Terhadap Transparansi Laporan Keuangan.

Kemudian analisis data yang dilakukan atas Teknologi Informasi diperoleh nilai *outer loading* terbesar yaitu dari aspek efektifitas Penggunaan Teknologi Informasi sebesar 0.943. Kemudian nilai *outer loading* terkecil terdapat pada aspek ketersediaan jaringan komunikasi yaitu sebesar 0,925. Perolehan nilai *outer loading* tersebut menunjukkan dalam penggunaan teknologi informasi harus sesuai dengan efektifitas penggunaannya.

Selain itu, hasil pengujian deskriptif pada variabel Teknologi Informasi diperoleh hasil skala dari masing masing indikator pengukuran yang digunakan. Pengujian deskriptif yang dilakukan diperoleh hasil skor berdasarkan skala liker dengan rentang skor sebesar 2,61 - 3,40. Perolehan nilai tersebut menunjukkan kategori cukup baik dengan asumsi sedang. Sehingga dengan demikian

penggunaan Teknologi informasi pada OPD Kota Binjai belum sepenuhnya optimal.

Ketidak optimalnya penggunaan teknologi informasi tersebut terjadi akibat rendahnya efektifitas penggunaan teknologi informasi tersebut. Hasil pengujian deskriptif menunjukkan perolehan nilai efektifitas penggunaan teknologi informasi sebesar 3,27 atau sebesar 65,4%. Dengan demikian dapat diketahui efektifitas penggunaan teknologi informasi belum terlaksana dengan baik.

Rendahnya pencapaian efektifitas penggunaan teknologi informasi tersebut berdampak pada ketransparansian penyajian informasi keuangan. Menurut Nur Maflikhah (2010) salah satu bentuk efektifitas penggunaan teknologi informasi adalah kemampuan dari penggunaan teknologi tersebut dalam mengembangkan pekerjaan. Penggunaan ataupun pemanfaatan Teknologi Informasi pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah penyajian informasi atas suatu kegiatan serta kemampuan dalam melakukan penyesuaian atas terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu lingkup organisasi.

Dengan tersedianya Teknologi informasi yang memiliki efektivitas penggunaan yang baik dalam lingkungan publik akan mampu memberikan kejelasan dan keterbukaan atas suatu kegiatan terhadap penggunaan kepentingan. Keterbukaan atas suatu kegiatan dalam organisasi menggambarkan adanya ketransparansian informasi antara pihak manajemen terhadap pegawai serta para pemangku kepentingan di lingkup eksternal organisasi.

Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas jika pemerintah daerah terus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya (Hahenus, 2015). Aksesibilitas laporan



keuangan dapat ditingkatkan dengan cara memfasilitasi berbagai pihak berkepentingan dan masyarakat untuk memperoleh informasi laporan keuangan dengan mudah. Oleh karena itu pemerintah, berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik bagi orang-orang yang berkepentingan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha, 2011) bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan. Selain itu terdapat juga penelitian lain yang menunjukkan hasil serupa bahwa teknologi informasi dapat mempengaruhi transparansi laporan keuangan (Wardani & Andriyani, 2017) dan (Cholis & Fadli, 2017).

Hal ini sejalan juga dikemukakan oleh (Amran, 2019) dalam penelitiannya bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA). Dengan demikian Pemanfaatan teknologi informasi yang baik erat hubungannya dengan pencapaian akuntabilitas kinerja organisasi.

#### **4.2.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Laporan Keuangan**

Pengujian hipotesis yang dilakukan atas pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Laporan Keuangan menunjukkan hasil perolehan nilai koefisien jalur sebesar 0.496 (Positif). Perolehan hasil tersebut menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan nilai pada sistem pengendalian intern akan meningkatkan nilai pada transparansi laporan keuangan sebesar 49,6%. Kemudian hasil pengujian hipotesis yang dilakukan juga menunjukkan perolehan

nilai *P-Value* sebesar  $(0.000) < \alpha (0.05)$ . Dengan demikian sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan.

Pengujian yang dilakukan terhadap sistem pengendalian intern juga menunjukkan perolehan nilai *outer loading* terbesar dari sistem pengendalian intern yaitu 0.965 pada aspek kegiatan pengendalian dan perolehan nilai *outer loading* terkecil pada aspek penilaian resiko sebesar 0.940. Dengan demikian dalam menerapkan sistem pengendalian intern berkaitan erat dengan pemenuhan dan pelaksanaan kegiatan pengendaliannya.

Pengujian deskriptif pada variabel Sistem Pengendalian Intern diperoleh hasil skala dari masing masing indikator pengukuran yang digunakan. Pengujian deskriptif yang dilakukan diperoleh hasil skor berdasarkan skala liker dengan rentang skor sebesar 2,61 - 3,40. Perolehan nilai tersebut menunjukkan kategori cukup baik dengan asumsi sedang. Sehingga dengan demikian penerapan sistem pengendalian intern yang di lakukan pada lingkungan OPD Kota Binjai belum sepenuhnya mampu memberikan control dan evaluasi terhadap aktifitas operasional kegiatan pemerintah.

Tidak optimalnya sistem pengendalian intern tersebut terjadi akibat dari lemahnya penilaian resiko yang dilaksanakan. Hasil pengujian deskriptif yang dilakukan menunjukkan hasil sebesar 3,27 atau hanya sebesar 65,5% kegiatan penilaian resiko dari sistem pengendalian intern mampu mengindikasikan resiko-resiko yang akan terjadi atas sebuah pelaksanaan kegiatan.

Hal ini berdampak pada peertanggung jawaban penyajian informasi. Kegiatan Pengendalian dalam Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas

dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas Reviuw atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan, Pembinaan sumber daya manusia, Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, Pengendalian fisik atas asset, Penetapan dan reviuw atas indikator dan ukuran kinerja, Pemisahan fungsi, Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Transparansi menurut (Mursyidi, 2013) yaitu “memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur karena masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah yang transparan diperlukan adanya suatu sistem pengendalian intern yang dipergunakan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pemerintah yang transparan. Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2016: 20). Ketercapaian suatu sistem pengendalian intern dalam memberikan pengawasan pengendalian

terhadap kegiatan pemerintah yang transparan dapat dilihat dari pelaksanaan aspek lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha, 2011) bahwa sistem pengendalian intern (lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian, dan pemantauan pengendalian intern) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi aset tetap di pemerintah. Kemudian hasil serupa ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Sari, Mulyani, & Budiarto, 2020) bahwa kontrol internal memiliki dampak signifikan pada transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola laporan keuangan regional.

#### **4.2.3. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Pengujian hipotesis yang dilakukan atas pengaruh Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0.289 (Positif). Perolehan nilai koefisien jalur tersebut menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan nilai pada Teknologi informasi akan diikuti oleh perubahan nilai pada Akuntabilitas Kinerja. Pengujian hipotesis yang dilakukan juga menunjukkan hasil perolehan nilai *P-Value* sebesar  $(0.000) < 0,05$ . Dengan demikian Teknologi Informasi dapat mempengaruhi Akuntabilitas kinerja.

Perolehan nilai *outer loading* terbesar dari teknologi informasi sebesar 0.944 pada aspek jaringan telekomunikasi menunjukkan bahwa dalam penggunaan teknologi informasi erat hubungannya dengan penggunaan jaringan telekomunikasi. Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang baik akan membantu

kelancaran pengaplikasian oleh para user yang menggunakan teknologi informasi tersebut.

Dalam hal penggunaan teknologi informasi guna meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan, permasalahan yang terjadi terdapat pada aspek kemanfaatan. Hasil pengujian deskriptif menunjukkan perolehan nilai sebesar 3,31 berdasarkan skala hal ini termasuk dalam kategori sedang. Dengan kata lain penggunaan teknologi informasi belum sepenuhnya optimal dan sesuai dengan kebutuhan.

Rendahnya kemanfaatan penggunaan teknologi informasi yang digunakan berdampak pada penggunaan sumber daya. Akuntabilitas kinerja yang baik seharusnya mampu memanfaatkan sumber daya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Namun pada pengaplikasiannya, penggunaan sumber daya belum optimal terlaksana.

Menurut (Sutabri, 2012) “Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambil keputusan. Teknologi informasi adalah suatu teknologi berbasis komputer untuk mengolah data menjadi informasi yang berkualitas sehingga berguna untuk pengambilan keputusan.

Dengan demikian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus didukung dengan teknologi informasi yang memadai, yang dapat digunakan untuk memudahkan kegiatan operasional organisasi dan pencapaian kinerja yang

akuntabel. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pencapaian akuntabilitas kinerja yang baik dipengaruhi berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian akuntabilitas kinerja adalah Teknologi informasi.

Menurut (Steers, 1980) menyatakan bahwa “faktor-faktor yang menyokong keberhasilan suatu organisasi adalah Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan penggunaan teknologi dalam organisasi. Dengan demikian dapat diketahui keterkaitan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja yaitu pada kemanfaatan teknologi tersebut. Pemanfaatan teknologi yang efektif dan efisien akan mendukung tercapainya pelaksanaan kegiatan yang berakuntabilitas.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Amran, 2019) dalam penelitiannya bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA). Kemudian dikuatkan kembali oleh penelitian yang dilakukan oleh (Cholis & Fadli, 2017) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Dengan demikian Pemanfaatan teknologi informasi yang baik erat hubungannya dengan pencapaian akuntabilitas kinerja organisasi.

#### **4.2.4. Pengaruh Sistem Pengendalian Inter Terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan hasil perolehan nilai koefisien jalur sebesar 0,341 atas pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini mengindikasikan apabila terjadi perubahan nilai pada sistem pengendalian intern akan di ikuti oleh perubahan nilai pada akuntabilitas kinerja sebesar 34,1%. Kemudian hasil pengujian yang dilakukan juga menunjukkan perolehan nilai P-Value sebesar  $(0.000) < (0.05)$ . Dengan demikian sistem pengendalian intern dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja keuangan.

Selain itu hasil analisis daya yang dilakukan pada sistem pengendalian intern diperoleh nilai *outer loading* sebesar 0.965 dari indikator kegiatan pengendalian. Dengan demikian kegiatan pengendalian sangat dominan dalam memberikan keterkaitan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern.

Menurut Indra Bastian (2010:385) Akuntabilitas Publik adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah perkara yang mudah dikarenakan berbagai faktor yang dapat menghambat pelaksanaan akuntabilitas kinerja publik. Ada dua kondisi yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja organisasi, yaitu kapabilitas organisasi yaitu konsep yang dipakai untuk menunjuk pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan". Kondisi yang kedua adalah lingkungan eksternal, yang terdiri atas dua faktor strategik, yaitu peluang dan ancaman atau tantangan.

Atas hal tersebut diperlukan adanya sebuah system yang dapat dipergunakan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan dan memberikan pengendalian dan peningkatan terhadap aktifitas kegiatan pemerintahan. Menurut Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui keberadaan sistem pengendalian intern bertujuan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan prosedur dan tujuan. Dengan artian lain akuntabilitas kinerja akan terlaksana apabila dalam pelaksanaan tersebut telah terdapat system pengendalian intern yang memadai.

Hal tersebut sejalan dengan beberapa hasil penelitian yang dilakukan para peneliti terdahulu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amran, 2019), (Cholis & Fadli, 2017), dan (Nauap, Ulfah, & Setiawaty, 2016) menyatakan bahwa Sistem pengendalian intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja. Dengan demikian data dikatakan bahwa dalam pencapaian akuntabilitas kinerja baik diperlukan adanya suatu system pengendalian intern yang dapat mendukung dan memberikan evaluasi serta pengendalian atas berjalannya suatu kegiatan organisasi baik swasta maupun pemerintah.



#### **4.2.5. Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Pengujian hipotesis pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0.528. Hal ini mengindikasikan pengaruh terbesar dalam konstruk penelitian yang dilakukan. Setiap adanya perubahan nilai yang terjadi pada transparansi laporan keuangan akan diikuti perubahan nilai yang searah dari variabel akuntabilitas kinerja keuangan.

Selain itu pengujian hipotesis yang dilakukan juga menunjukkan perolehan nilai *P-Value* sebesar  $(0.000) < (0,05)$ . Dengan demikian transparansi laporan keuangan dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja keuangan.

Hasil pengujian juga menunjukkan nilai *outer loading* terbesar dari konstruk pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan sebesar 0.931 dari aspek publikasi kebijakan dan penyajian informasi. Pelaksanaan kinerja yang berakuntabilitas tidak bisa terlepas dari aspek-aspek yang mempengaruhinya. Salah satu bentuk dari pelaksanaan kinerja yang berakuntabilitas adalah ketransparansian.

Untuk mengukur besarnya ketercapaian pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan dilingkungan OPD Kota Binjai dilakukan analisis deskriptif atas perolehan jawaban responden. Dari pengujian tersebut diperoleh nilai skor dengan rentang skala antara 3,41 - 4,20. Perolehan nilai tersebut telah menunjukkan pelaksanaan ketransparansian telah dilakukan dengan baik.

Ketransparansian yang dimaksud dalam hal ini adalah keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait kegiatan pemerintahan.

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan kegiatan yang transparan merupakan salah satu bentuk telah tercapainya pelaksanaan kegiatan yang berakuntabilitas.

Namun demikian pada pelaksanaan dari sisi pandang masyarakat, pelaksanaan ketertransparansian tersebut belum sesuai. Pemerintah telah melakukan upaya yang baik dalam hal meningkatkan ketertransparansian, namun masyarakat belum menerima umpan balik sesuai dengan yang digarapkan pemerintah. Dari hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan permasalahan dalam hal ketransparansian pada indikator penyajian informasi yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggung jawabkan. Dimana pengujian deskriptif tersebut menunjukkan perolehan nilai sebesar 3,94 atau dalam persentase sebesar 78,8%. Hal ini mengindikasikan penyajian informasi oleh pemerintah belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal.

Ketidak optimalan penyajian informasi tersebut akan dapat berdampak langsung terhadap akuntabilitas kinerja keuangan dalam aspek keterbukaan. Salah satu bentuk dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang baik adalah adanya keterbukaan informasi dari berbagai pihak terhadap pihak yang membutuhkan informasi. Namun yang terjadi saat ini penyajian informasi yang dilakukan masih belum memenuhi aspek keterbukaan atau dengan kata lain masih terdapat informasi-informasi kegiatan yang dilaksanakan yang tidak disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Setiawan & Safri, 2016) dengan hasil yang menunjukkan bahwa transparansi publik dan pengawasan

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah.

Pendapat lain dikemukakan (Sedarmayanti, 2007) transparansi adalah bahwa individu, kelompok atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas diarahkan tanpa adanya kebohongan atau motivasi yang tersembunyi, dan bahwa seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan. Dengan demikian penerapan pemerintahan yang transparan merupakan bentuk terciptanya akuntabilitas kinerja yang baik.

#### **4.2.6. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan yang di Mediasi Transparansi Laporan Keuangan.**

Sebelumnya telah dijelaskan teknologi informasi secara langsung dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah. Namun secara tidak langsung teknologi informasi juga dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja keuangan.

Pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung atas mediasi transparansi laporan keuangan terhadap pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan diperoleh nilai P-Value  $(0.000) < (0.05)$ . hal ini mengindikasikan bahwa Transparansi laporan keuangan dapat memediasi pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.

Pengaruh tidak langsung tersebut terjadi akibat adanya mediasi dari ketransparansian. Besarnya pengaruh mediasi dari transparansi laporan keuangan atas pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas dapat dilihat dari hasil perolehan koefisien jalur sebesar 0.262. Perolehan nilai tersebut mengindikasikan bahwa variabel transparansi laporan keuangan menjadi perantara pengaruh

teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan sebesar 26,2%. Hasil perolehan pengaruh tidak langsung teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan yang dimediasi transparansi laporan keuangan sebesar  $0,262 <$  dari perolehan nilai pengaruh langsung teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja 0,263.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja keuangan keberadaan teknologi informasi dan transparansi merupakan faktor yang dapat mempengaruhinya. Namun demikian teknologi informasi juga dapat mempengaruhi pelaksanaan transparansi. Sehingga dengan adanya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan penerapan pelaksanaan transparansi laporan keuangan yang secara tidak langsung juga keberadaan transparansi akan memperantarai pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.

#### **4.2.7. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Yang Dimediasi Transparansi Laporan Keuangan**

Pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja keuangan yang dimediasi oleh transparansi laporan keuangan diperoleh nilai P-Value sebesar ( $0.003 < 0.05$ ). Dengan demikian Transparansi laporan keuangan memediasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.

Besarnya pengaruh mediasi dari transparansi laporan keuangan terhadap pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja keuangan dapat dilihat dari perolehan nilai koefisien jalur sebesar 0.180. yang

mengindikasikan transparansi laporan keuangan memediasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja keuangan sebesar 18%.

Perolehan nilai koefisien jalur pengaruh tidak langsung sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja keuangan yang dimediasi transparansi laporan keuangan  $0.180 <$  dari perolehan nilai koefisien jalur pengaruh langsung sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja keuangan  $0,289$ . Dengan demikian dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja keuangan lebih dipengaruhi secara langsung dari sistem pengendalian intern tanpa adanya perantara dari transparansi laporan keuangan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian pengaruh Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan OPD Pemerintah Kota Binjai yang dimediasi transparansi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Transparansi Laporan Keuangan
2. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Transparansi Laporan Keuangan
3. Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan
4. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan
5. Transparansi Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan.
6. Transparansi Laporan Keuangan memediasi pengaruh Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan.
7. Transparansi Laporan Keuangan memediasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan.

## 5.2. Saran

Berasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah agar meningkatkan penggunaan teknologi informasi dengan memperbaiki penggunaan jaringan komunikasi guna memperlancar arus penyampaian informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan organisasi.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan penilaian resiko dalam pengaplikasian sistem pengendalian intern agar dapat minimalis terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi baik bidang keuangan maupun diluar dari aspek keuangan.
3. Diharapkan kepada pemerintah daerah agar meningkatkan kembali ketransparansian informasi kegiatan dengan menjalin kerja sama dengan pihak Media Massa agar masyarakat luas maupun pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi kegiatan pemerintah dengan mudah.
4. Diharapkan kepada pemerintah agar kedepannya untuk memperbaiki aspek publik dalam memperoleh informasi pemerintah sehingga temuan dari pihak eksternal tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas kegiatan pemerintahan yang telah dilaksanakan.
5. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi. Namun lebih menyesuaikan penggunaan faktor-faktor yang mempengaruhi dan indikator pengukuran yang digunakan sehingga pembuktian terhadap hipotesis penelitian dapat tercapai dan hasil penelitian lebih sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adha, W. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Pimpinan Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kota Dumai). *Jom Fekon*, 1(2).
- Adrianto, N. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Palangkaraya: Bayumedia.
- Amran, A. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah: Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palopo. 5(1), 3-19.
- Arifian, D., & Bowo, F. A. (2014). Analisis Economic Value Added Return on Asset (ROA) Pada Kinerja Perusahaan Terbuka. *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*, 2(1), 2337-6112.
- Astuty, W. (2016). Peran Auditor Internal Dan Pengendalian Intern Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *ICAF UMY*, 2, 1-21.
- Cholis, N., & Fadli. (2017). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas Publik Dan Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Fairness*, 7(2), 127-136.
- Christian, J. H., Ringle, M., & Sardted, M. (2015). *A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling*. Mark. Sci.
- Hahenussa, S. J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Jurnal Unissula*.
- Halmawati, & Mustin. (2015). *enerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Dalam Perspektif Tekanan Eksternal Dan Komitmen Organisasi*. Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi : Universitas Negeri Padang.
- Juliandi, A. (2018). *Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) Menggunakan SmartPLS*. Batam: Universitas Batam.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU Press.
- Krina. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Medina, F. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nauap, N. F., Ulfah, Y., & Setiawaty, A. (2016). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi. *JIAM*, 1(1), 25-33.



- Noor, J. (2015). *Analisis Data penelitian Ekonomi Dan Manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- Noprizal, R. (2017). pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen, Dan Sistem Pengendalian Pemerintah Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu). *Jom Fekon*, 4(1).
- Nugraha, D. S. (2011). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Aset Tetap Pemerintah. *Sigma*, 3(1), 55-72.
- Purba, R. B., & Amrul, A. M. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 140-152.
- Rai, I. G. (2008). *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridha, M., & Basuki, H. (2012). pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Laporan Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, 20-23.
- Rochman, M. G. (2008). *Good Governance*. Yogyakarta: Andi.
- Sari, E. N., Muhyarsyah, M., & Wahyuni, N. S. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 166-197.
- Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *JRAMB*, 6(1), 1-10.
- Sedarmayanti. (2007). *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, H. E., & Safri, M. (2016). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 51-72.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tanjung, A. H. (2011). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: Sebuah Tangan.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88-98.
- Wintari, K. A., & Suardana, K. A. (2018). Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen

Organisasi Pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(1), 1-27.

- Yesnita, M. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, dan Sistem pengendalian internal pemerintah Pemerintah terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Bukittinggi. *Jom Fekon*, 3(1).
- Yosa. (2010). *Pengertian Pengawasan*. [www.Itjenkemdagri.Go.Id](http://www.Itjenkemdagri.Go.Id).

## LAMPIRAN

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	Z.8	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2
1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1
2	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1
1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
2	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2
1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2
2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2
1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1
4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5
5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4
5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5
4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4
4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4
4	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4
4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	4	4	2	2	2	2	1	1	1	1	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	4	5	5	1	1	2	1	2	1	1	1	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	5	5	4	4	4	2	2	1	2	1	2	2	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	5	5	4	4	2	2	2	2	2	1	1	1	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5
4	5	5	5	5	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4
5	5	5	5	4	4	4	4	2	2	2	1	1	1	1	1	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
5	5	4	4	4	4	5	5	1	1	1	1	2	2	2	2	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
4	4	4	5	5	5	5	5	2	2	2	1	1	1	1	1	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5
5	5	5	4	4	4	5	5	1	1	1	2	2	1	1	1	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5
4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5
5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	Z.8	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8
5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	5
5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5
4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5
5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5
4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4
5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5
1	1	1	2	2	2	1	1	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4
1	1	2	2	2	1	1	1	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5
1	1	1	1	2	2	2	2	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5
2	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5
2	2	2	2	2	2	1	1	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
1	1	1	2	2	2	2	2	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4
1	2	2	2	1	1	2	2	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5
1	1	1	2	2	2	2	2	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4
2	1	1	1	2	2	2	2	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
2	2	1	1	1	1	2	2	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4
4	4	3	3	3	3	3	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	3	3	3	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5
4	4	4	4	3	4	3	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4
3	3	4	3	3	4	4	3	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4
4	4	4	4	3	4	3	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4
3	3	3	4	4	4	3	3	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5
3	3	3	3	3	3	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4
3	3	3	4	4	4	3	3	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5
4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5
5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5
4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4
4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5
4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	Z.8	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	
4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5		
4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5		
3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	4	4	5	5	5	5	4	3	3	3	3	3	4	3	
4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4
3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	
3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	5	5	5	5	4	4	5	3	3	3	3	3	4	4	
3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	
3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	4	4	4	3	3	3	
4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	3	3	3	3	4	4	3	3	
3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	
3	3	3	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	4	4	4	4	4	4	5	5	3	3	2	2	3	3	3	3	
3	3	2	2	2	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	2	
3	3	3	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	2	2	2	3	3	3	
2	2	2	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	2	2	2	2	2	
3	3	3	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	5	5	5	5	3	3	3	3	3	2	3	3	
2	2	3	3	3	2	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	4	4	4	3	3	3	4	4		
2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4	4		
2	2	3	3	3	3	2	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	4	4	4	4	3	3	3		
3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3		
3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2		
3	3	3	3	2	2	2	2	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2		
3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2		
3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3		

## X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	12	12,6	12,6	12,6
	KURANG MEMADAI	14	14,7	14,7	27,4
	CUKUP MEMADAI	20	21,1	21,1	48,4
	MEMADAI	30	31,6	31,6	80
	SANGAT MEMADAI	19	20	20	100
	Total	95	100	100	

## X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	13	13,7	13,7	13,7
	KURANG MEMADAI	13	13,7	13,7	27,4
	CUKUP MEMADAI	19	20	20	47,4
	MEMADAI	32	33,7	33,7	81,1
	SANGAT MEMADAI	18	18,9	18,9	100
	Total	95	100	100	

## X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	14	14,7	14,7	14,7
	KURANG MEMADAI	11	11,6	11,6	26,3
	CUKUP MEMADAI	22	23,2	23,2	49,5
	MEMADAI	31	32,6	32,6	82,1
	SANGAT MEMADAI	17	17,9	17,9	100
	Total	95	100	100	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	13	13,7	13,7	13,7
	KURANG MEMADAI	15	15,8	15,8	29,5
	CUKUP MEMADAI	19	20	20	49,5
	MEMADAI	29	30,5	30,5	80
	SANGAT MEMADAI	19	20	20	100
	Total	95	100	100	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	10	10,5	10,5	10,5
	KURANG MEMADAI	20	21,1	21,1	31,6
	CUKUP MEMADAI	18	18,9	18,9	50,5
	MEMADAI	25	26,3	26,3	76,8
	SANGAT MEMADAI	22	23,2	23,2	100
	Total	95	100	100	

X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	14	14,7	14,7	14,7
	KURANG MEMADAI	16	16,8	16,8	31,6
	CUKUP MEMADAI	16	16,8	16,8	48,4
	MEMADAI	25	26,3	26,3	74,7
	SANGAT MEMADAI	24	25,3	25,3	100
	Total	95	100	100	

X1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	10	10,5	10,5	10,5
	KURANG MEMADAI	18	18,9	18,9	29,5
	CUKUP MEMADAI	19	20	20	49,5
	MEMADAI	22	23,2	23,2	72,6
	SANGAT MEMADAI	26	27,4	27,4	100
	Total	95	100	100	

X1.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	10	10,5	10,5	10,5
	KURANG MEMADAI	16	16,8	16,8	27,4
	CUKUP MEMADAI	17	17,9	17,9	45,3
	MEMADAI	30	31,6	31,6	76,8
	SANGAT MEMADAI	22	23,2	23,2	100
	Total	95	100	100	

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	13	13,7	13,7	13,7
	KURANG MEMADAI	13	13,7	13,7	27,4
	CUKUP MEMADAI	13	13,7	13,7	41,1
	MEMADAI	30	31,6	31,6	72,6
	SANGAT MEMADAI	26	27,4	27,4	100
	Total	95	100	100	



## X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	11	11,6	11,6	11,6
	KURANG MEMADAI	15	15,8	15,8	27,4
	CUKUP MEMADAI	15	15,8	15,8	43,2
	MEMADAI	28	29,5	29,5	72,6
	SANGAT MEMADAI	26	27,4	27,4	100
	Total	95	100	100	

## X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	14	14,7	14,7	14,7
	KURANG MEMADAI	12	12,6	12,6	27,4
	CUKUP MEMADAI	14	14,7	14,7	42,1
	MEMADAI	31	32,6	32,6	74,7
	SANGAT MEMADAI	24	25,3	25,3	100
	Total	95	100	100	

## X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	12	12,6	12,6	12,6
	KURANG MEMADAI	14	14,7	14,7	27,4
	CUKUP MEMADAI	15	15,8	15,8	43,2
	MEMADAI	37	38,9	38,9	82,1
	SANGAT MEMADAI	17	17,9	17,9	100
	Total	95	100	100	

X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	14	14,7	14,7	14,7
	KURANG MEMADAI	12	12,6	12,6	27,4
	CUKUP MEMADAI	12	12,6	12,6	40
	MEMADAI	32	33,7	33,7	73,7
	SANGAT MEMADAI	25	26,3	26,3	100
	Total	95	100	100	

X2.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	19	20	20	20
	KURANG MEMADAI	7	7,4	7,4	27,4
	CUKUP MEMADAI	11	11,6	11,6	38,9
	MEMADAI	27	28,4	28,4	67,4
	SANGAT MEMADAI	31	32,6	32,6	100
	Total	95	100	100	

X2.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	18	18,9	18,9	18,9
	KURANG MEMADAI	8	8,4	8,4	27,4
	CUKUP MEMADAI	9	9,5	9,5	36,8
	MEMADAI	25	26,3	26,3	63,2
	SANGAT	35	36,8	36,8	100

	MEMADAI				
	Total	95	100	100	

## X2.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	18	18,9	18,9	18,9
	KURANG MEMADAI	8	8,4	8,4	27,4
	CUKUP MEMADAI	11	11,6	11,6	38,9
	MEMADAI	24	25,3	25,3	64,2
	SANGAT MEMADAI	34	35,8	35,8	100
	Total	95	100	100	

## Z1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	5	5,3	5,3	5,3
	KURANG MEMADAI	10	10,5	10,5	15,8
	CUKUP MEMADAI	5	5,3	5,3	21,1
	MEMADAI	35	36,8	36,8	57,9
	SANGAT MEMADAI	40	42,1	42,1	100
	Total	95	100	100	

## Z2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	6	6,3	6,3	6,3
	KURANG MEMADAI	8	8,4	8,4	14,7
	CUKUP MEMADAI	6	6,3	6,3	21,1
	MEMADAI	35	36,8	36,8	57,9

	SANGAT MEMADAI	40	42,1	42,1	100
	Total	95	100	100	

## Z3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	7	7,4	7,4	7,4
	KURANG MEMADAI	9	9,5	9,5	16,8
	CUKUP MEMADAI	4	4,2	4,2	21,1
	MEMADAI	38	40	40	61,1
	SANGAT MEMADAI	37	38,9	38,9	100
	Total	95	100	100	

## Z4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	9	9,5	9,5	9,5
	KURANG MEMADAI	7	7,4	7,4	16,8
	CUKUP MEMADAI	4	4,2	4,2	21,1
	MEMADAI	33	34,7	34,7	55,8
	SANGAT MEMADAI	42	44,2	44,2	100
	Total	95	100	100	

## Z5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	7	7,4	7,4	7,4
	KURANG MEMADAI	8	8,4	8,4	15,8
	CUKUP MEMADAI	5	5,3	5,3	21,1
	MEMADAI	30	31,6	31,6	52,6
	SANGAT MEMADAI	45	47,4	47,4	100
	Total	95	100	100	

## Z6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	8	8,4	8,4	8,4
	KURANG MEMADAI	7	7,4	7,4	15,8
	CUKUP MEMADAI	5	5,3	5,3	21,1
	MEMADAI	31	32,6	32,6	53,7
	SANGAT MEMADAI	44	46,3	46,3	100
	Total	95	100	100	

## Z7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	7	7,4	7,4	7,4
	KURANG MEMADAI	8	8,4	8,4	15,8
	CUKUP MEMADAI	5	5,3	5,3	21,1
	MEMADAI	38	40	40	61,1
	SANGAT MEMADAI	37	38,9	38,9	100
	Total	95	100	100	

## Z8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MEMADAI	7	7,4	7,4	7,4
	KURANG MEMADAI	8	8,4	8,4	15,8
	CUKUP MEMADAI	5	5,3	5,3	21,1
	MEMADAI	39	41,1	41,1	62,1
	SANGAT	36	37,9	37,9	100

	MEMADAI				
	Total	95	100	100	

## Y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SESUAI	6	6,3	6,3	6,3
	KURANG SESUAI	10	10,5	10,5	16,8
	CUKUP SESUAI	14	14,7	14,7	31,6
	SESUAI	36	37,9	37,9	69,5
	SANGAT SESUAI	29	30,5	30,5	100
	Total	95	100	100	

## Y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SESUAI	7	7,4	7,4	7,4
	KURANG SESUAI	9	9,5	9,5	16,8
	CUKUP SESUAI	15	15,8	15,8	32,6
	SESUAI	37	38,9	38,9	71,6
	SANGAT SESUAI	27	28,4	28,4	100
	Total	95	100	100	

## Y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SESUAI	10	10,5	10,5	10,5
	KURANG SESUAI	9	9,5	9,5	20
	CUKUP SESUAI	13	13,7	13,7	33,7
	SESUAI	37	38,9	38,9	72,6
	SANGAT SESUAI	26	27,4	27,4	100
	Total	95	100	100	

## Y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SESUAI	6	6,3	6,3	6,3
	KURANG SESUAI	14	14,7	14,7	21,1
	CUKUP SESUAI	11	11,6	11,6	32,6
	SESUAI	34	35,8	35,8	68,4
	SANGAT SESUAI	30	31,6	31,6	100
	Total	95	100	100	

## Y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SESUAI	5	5,3	5,3	5,3
	KURANG SESUAI	13	13,7	13,7	18,9
	CUKUP SESUAI	13	13,7	13,7	32,6
	SESUAI	29	30,5	30,5	63,2
	SANGAT SESUAI	35	36,8	36,8	100
	Total	95	100	100	

## Y6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SESUAI	6	6,3	6,3	6,3
	KURANG SESUAI	12	12,6	12,6	18,9
	CUKUP SESUAI	13	13,7	13,7	32,6

	SESUAI	33	34,7	34,7	67,4
	SANGAT SESUAI	31	32,6	32,6	100
	Total	95	100	100	

## Y7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SESUAI	6	6,3	6,3	6,3
	KURANG SESUAI	11	11,6	11,6	17,9
	CUKUP SESUAI	11	11,6	11,6	29,5
	SESUAI	34	35,8	35,8	65,3
	SANGAT SESUAI	33	34,7	34,7	100
	Total	95	100	100	

## Y8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SESUAI	6	6,3	6,3	6,3
	KURANG SESUAI	11	11,6	11,6	17,9
	CUKUP SESUAI	12	12,6	12,6	30,5
	SESUAI	33	34,7	34,7	65,3
	SANGAT SESUAI	33	34,7	34,7	100
	Total	95	100	100	







**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<http://pascasarjana.umsu.ac.id>

[pps@umsu.ac.id](mailto:pps@umsu.ac.id)

[f/umsu](https://www.facebook.com/umsu)

[@umsu](https://www.instagram.com/umsu)

[umsu](https://www.linkedin.com/company/umsu)

[umsu](https://www.youtube.com/channel/UC...)

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari ini, Selasa, 1 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Tesis bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD SANUSI HASIBUAN  
 NPM : 1820050040  
 Prog.Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik  
 Judul Tesis : PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI

dengan catatan wajib memperbaiki:

Pembimbing I : *pembahasan harus lebih di eksplorasi. saran harus lebih operasional.*

Pembimbing II : *pembahasan dipertajam kembali.*

Penguji I :

Penguji II :

Penguji III : *Pembahasan, penulisan sgt banyak yg salah.*

Berita acara ini **ditandatangani** setelah tesis diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas.

Medan,

1 Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA  
Pembimbing I

2 Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.  
Pembimbing II

3 Assoc. Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA  
Penguji I

4 Dr. IRFAN, S.E., M.M.  
Penguji II

5 Dr. DAHRANI, S.E., M.Si.  
Penguji III

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : Muhammad Sanusi Hasibuan  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1820050040  
Prodi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik  
Judul Tesis : **Pengaruh Teknologi Informasi dan Sistem  
Pengendalian Intern Terhadap Transparansi  
Laporan Keuangan Serta Implikasinya  
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan  
Pemerintah Daerah Kota Binjai.**

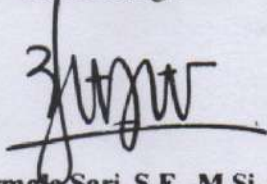
Disetujui untuk disampaikan kepada

**Panitia Sidang Tesis,**

Medan, Februari 2022

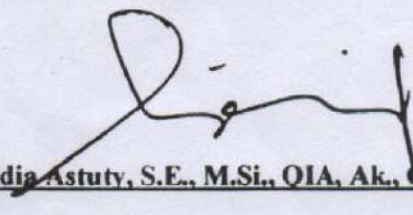
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



(Dr. Eka Nurmalia Sari, S.E., M.Si., Ak, CA)

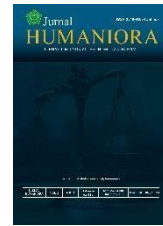
Pembimbing II



(Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., OIA, Ak., CA., CPA)

Available online at [www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora](http://www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora)  
ISSN 2548-9585 (Online)

## Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora



Lampoh Keude, 8 November 2023

Nomor : 401/SRT/LPPM/X/2023

Perihal : Penerimaan Artikel

Yth. Muhammad Sanusi Hasibuan  
Eka Nurmala Sari  
Widia Astuti

di Tempat

Assalamualaikum

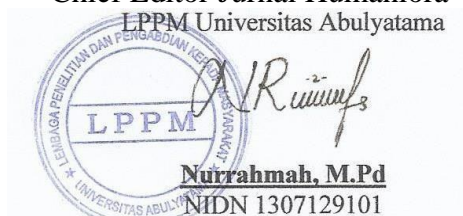
Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Hukum Universitas Abulyatama (e-ISSN: 2548-9585) dengan judul:

***Pengaruh Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Serta Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai***

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan diterima dan dapat dipublikasi di jurnal kami pada Volume 8, No. 1 April 2024.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Chief Editor Jurnal Humaniora  
LPPM Universitas Abulyatama



**Nurrahmah, M.Pd**  
NIDN 1307129101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111  
Website: [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) - [www.pascasarjana.umsu.ac.id](http://www.pascasarjana.umsu.ac.id)  
E-mail: [pps@umsu.ac.id](mailto:pps@umsu.ac.id)

**BERITA ACARA SEMINAR HASIL**

Pada hari ini, Jum'at, tgl. 4 Februari 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD SANUSI HASIBUAN  
NPM : 1820050040  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Tesis : PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. Penjelasan pada pernyataan diidentifikasi masalah harus menggunakan by Data
2. Pada pembahasan dijelaskan secara detail hasil penelitian & hubungan dgn kata penelitian
3. Bab 1 dan Bab 4 harus memiliki keterkaitan untuk menjawab permasalahan yg diteliti

Penguji/Pembahas III

  
Dr. DAHRANI, S.E., M.Si.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan,

Diketahui oleh:  
An. Direktur  
Ketua/Sekretaris Prodi,

  
Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

Penguji/Pembahas III

  
Dr. DAHRANI, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111  
Website: [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) - [www.pascasarjana.umsu.ac.id](http://www.pascasarjana.umsu.ac.id)  
E-mail: [pps@umsu.ac.id](mailto:pps@umsu.ac.id)

**BERITA ACARA SEMINAR HASIL**

Pada hari ini, Jum'at, tgl. 4 Februari 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD SANUSI HASIBUAN  
NPM : 1820050040  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Tesis : PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. *perbaiki semua dari penguji*

2.

3.

Pembimbing I

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan,

*Februari 2022*

Diketahui oleh:  
An. Direktur  
Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

Pembimbing I

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA



**UMSU**

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111  
Website [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) - [www.pascasarjana.umsu.ac.id](http://www.pascasarjana.umsu.ac.id)  
E-mail: [pps@umsu.ac.id](mailto:pps@umsu.ac.id)

**BERITA ACARA SEMINAR HASIL**

Pada hari ini, Jum'at, tgl. 4 Februari 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD SANUSI HASIBUAN  
NPM : 1820050040  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Tesis : PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI

dengan catatan wajib memperbaiki:

- 1.
- 2.
- 3.

Penguji/Pembahas II

**Dr. IRFAN, S.E., M.M.**

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan,

Diketahui oleh:  
An. Direktur  
Ketua/Sekretaris Prodi,

**Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA**

Penguji/Pembahas II

**Dr. IRFAN, S.E., M.M.**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111  
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id  
E-mail: pps@umsu.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR HASIL**

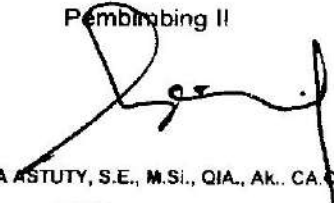
Pada hari ini, Jum'at, tgl. 4 Februari 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD SANUSI HASIBUAN  
NPM : 1820050040  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Tesis : PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. - *Pertanyaan kembali: latar belakang Masalah.*  
- *keaktifan Masalah diteliti kembali*
2. - *Pembahasan & pertanyaan kembali. kaitkan permasalahan yang ada dengan pembahasan.*
- 3.

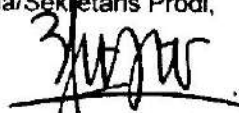
Pembimbing II

  
Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., AK., CA, CPA.

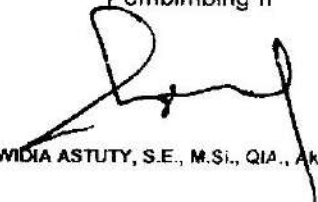
Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan,

Diketahui oleh:  
An. Direktur  
Ketua/Sekretaris Prodi,

  
Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

Pembimbing II

  
Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., AK., CA, CPA.





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 66811104 Fax. 061 - 88811111  
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id  
E-mail: pps@umsu.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR HASIL**

Pada hari ini, Jum'at, tgl. 4 Februari 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD SANUSI HASIBUAN  
NPM : 1820050040  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Tesis : PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. Latar belakang harus diperdalam untuk mengidentifikasi masalah
2. Pembahasan lebih diperdalam kembali, dan dikaitkan dengan permasalahan yg diteliti
- 3.

Penguji/Pembahas I

Assoc. Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Diketahui oleh:  
An. Direktur  
Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

Medan,

Penguji/Pembahas I

Assoc. Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA